

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) TERHADAP MUTU PENDIDIKAN
DI UPTD SD NEGERI 73 PAREPARE



OLEH

RASMI SIRAJUDDIN
NIM: 18.1900.050

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) TERHADAP MUTU PENDIDIKAN
DI UPTD SD NEGERI 73 PAREPARE**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Pada
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Parepare

OLEH

**RASMI SIRAJUDDIN
NIM. 18.1900.050**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

Skripsi

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH (BOS) TERHADAP MUTU PENDIDIKAN
DI UPTD SD NEGERI 73 PAREPARE**

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)**

**Program Studi
Manajemen Pendidikan Islam**

Disusun dan diajukan oleh

**RASMI SIRAJUDDIN
NIM. 18.1900.050**

Kepada

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare

Nama Mahasiswa : Rasmi Sirajuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.1900.050

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Tarbiyah Nomor 3086 Tahun 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Drs. Abd. Rahman K, M.Si., M.Pd. (.....)

NIP : 19621231 199103 1 033

Pembimbing Pendamping : Hasmiah Herawaty, M.Pd. (.....)

NIDN : 2006067402

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Tarbiyah


Dr. Zulfah, M.Pd. *RI*
NIP. 19830420 200801 2 010



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare

Nama Mahasiswa : Rasmi Sirajuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.1900.050

Fakultas : Tarbiyah

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Tarbiyah Nomor 3086 Tahun 2021

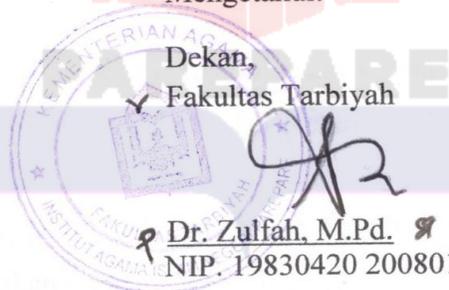
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Abd. Rahman K, M.Si., M.Pd.	(Ketua)	(.....)
Hasmiah Herawaty, M.Pd.	(Sekretaris)	(.....)
Drs. Amiruddin Mustam, M.Pd.	(Anggota)	(.....)
Muhammad Alwi, M.Pd.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Tarbiyah


Dr. Zulfah, M.Pd.
NIP. 19830420 200801 2 010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ”Sarjana Pendidikan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta bapak Sirajuddin dan Ibu Mahniati yang membimbing, memberikan motivasi dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Abd. Rahman K, M.Pd. dan Ibu Hasmiah Herawaty, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Zulfah, M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. Abdul Halik, M.Pd.I. sebagai Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama menempuh studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf fakultas yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak H. Andi Pajung, SPd, M.Pd. sebagai Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare yang telah mengizinkan peneliti untuk meneliti di sekolah tersebut.
8. Ayu Afriani, Ulfa Mulia, Nasmah, Ayu Rahayu, Aslam, serta teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 Fakultas Tarbiyah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt., berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Januari 2023

8 Rajab 1444 H

Penulis



Rasmi Sirajuddin

NIM. 18.1900.050

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rasmi Sirajuddin
Nim : 18.1900.050
Tempat/Tgl Lahir : Maroangin, 27 April 1999
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pengellaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di SD Negeri 73 Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Januari 2023

Penulis,



Rasmi Sirajuddin
NIM. 18.1900.050

ABSTRAK

Rasmi Sirajuddin, *Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare* (Dibimbing oleh Abd. Rahman K dan Hasmiah Herawaty)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian menggunakan data yang memanfaatkan data deskriptif dengan metode pengumpulan data, Wawancara dan Dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS belum terlaksana dengan baik, karena dalam pencairan dana BOS masih mengalami keterlambatan yang berdampak pada kekurangannya sarana dan prasarana yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare, Kepala sekolah, bendahara guru dan Komite Sekolah, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yaitu transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien yang telah berupaya untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan.

Efektivitas Pengelolaan dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan Dengan adanya dana BOS disekolah maka dapat membantu para peserta didik maupun tenaga pendidik, Penentuan sasaran, sosialisasi dan pemantauan program dana BOS yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran, sosialisasi dan pemantauan program yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Kata Kunci: *Dana BOS, Efektivitas Pengelolaan, Mutu Pendidikan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	9
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	32

D. Fokus Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Keabsahan Data	34
G. Teknis Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Bentuk Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare	38
2. Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan ...	53
B. Pembahasan	63
1. Bentuk Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare	63
2. Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare	73
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR TABEL

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Data Sarana dan Prasarana di UPTD SD Negeri 73 Parepare	XXIII



DAFTAR GAMBAR

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	30
	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari IAIN Parepare	V
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sulawesi Selatan	VI
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari UPTD SD Negeri 73 Parepare	VII
4	Surat Pernyataan	VIII
5	Matriks Wawancara Penelitian	XII
6	Pedoman Wawancara	XIII
7	RKAS dan Keadaan sarana dan prasarana	XXIII
8	Dokumentasi	XXIV
9	Rekapilitasi Realisasi Penggunaan Dana BOS	XXVIII
10	Biografi Penulis	XXIX

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam hurufLatin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de

ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آيَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِيَّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُو : 'Aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلی اللہ علیہ وسلم = صلعم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotir” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian pendidikan. Pendidikan juga dapat dikatakan suatu usaha untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran ataupun latihan untuk masa yang akan datang. Pendidikan semestinya mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan pengetahuan, mampu menguasai teknologi serta mampu membangun kemandirian bangsa. Sehubungan dengan dunia pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, inovatif, dan religius dalam mengatasi suatu masalah, berani, bermoral, berakhlak, inovatif, dan religius dalam mengatasi suatu masalah, berani, bermoral, berakhlak mulia, siap menghadapi perubahan, dan mampu bersaing di dunia luas yaitu nasional maupun internasional.¹

Pentingnya pendidikan bagi setiap kalangan manusia, sebagaimana dalam Firman Allah Q.S. Al-Jumu'ah/62: 2.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat – ayat- Nya kepada mereka, mensucikan

¹Yenni Anggraini, *Analisis Kompetensi Pedagogik Guru PAI Di SMP Negeri 1 Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir* (Uin Raden Fatah Palembang, 2020),h.3.

mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah (AS Sunnah) dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar – benar dalam kesesatan yang nyata.²

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa pendidikan kualitas pendidikan ditunjukkan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat memberikan solusi dalam kehidupan manusia diberbagai aspek sesuai dengan kapasitas masing – masing.

Dalam rangka mencapai kualitas lulusan yang memenuhi tuntutan IPTEK, pengelolaan dan pelaksanaan layanan pendidikan di sekolah menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan secara maksimal dan terorganisir. Salah satu faktor penentu kualitas lulusan yaitu sejauh mana sekolah dapat menunjukkan ketersediaan, kelengkapan, kelayakan sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pelayanan dan sikap empati dalam pelayanan pendidikan di sekolah.³ Layanan pendidikan memiliki peranan penting bagi lembaga pendidikan sebagai penyelenggara layanan agar memiliki daya saing dengan sekolah – sekolah lainnya. Pengelolaan sekolah yang baik akan membuat lembaga pendidikan tersebut populer, semakin maju dan di minati oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan serta berdampak pada mutu lulusan.⁴

Pemerintah sebagai penanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu membuat kebijakan – kebijakan yang dipastikan terimplementasi secara baik pada satuan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah produk yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi maupun sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini merupakan suatu penentu penetapan standar dari

² Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: As Syaamil, 2005), h. 553

³ Muhammad Basri, "Budaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan," *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Vol. 1, No (2011): 161.

⁴ Yean Chris Tien, "Manajemen Peningkatan Lulusan," *jurnal Manajer Pendidikan* Vol. 9, No 4 (2015). h. 9.

kerja yang dilakukan setiap hari berdasarkan proses masukan (input), proses keluaran (output), manfaat dan keuntungan dalam menghasilkan suatu kinerja optimal yang berkualitas. Implementasi kebijakan menyakut tiga hal yaitu, adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan.⁵

Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan yakni tersedianya dana BOS sebagai penopang kegiatan akademik dan operasional di sekolah. Bantuan operasional sekolah merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak bisa mengikuti pendidikan dengan alasan kekurangan biaya. Secara khusus program dana BOS membebaskan pungutan pada seluruh siswa kurang mampu dari seluruh biaya dalam bentuk apapun. Keberadaan dana BOS dapat meringankan kesulitan orang tua dalam membantu peningkatan akademik peserta didik.⁶ Hal tersebut akan memberikan nilai positif pada pengembangan potensi diri berupa kecerdasan spiritual, kepribadian dan keterampilan yang diperlukan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pada praktiknya, BOS diperuntukkan pada seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah dalam penyediaan biaya non personal.

Untuk menjamin pengelolaan dana BOS berjalan dengan baik sesuai petunjuk pemerintah, maka setiap satuan pendidikan perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah yang transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien.

⁵Lilis Suriani Fika Ayu Lestari, Muh. Rahim, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Program Bantuan Operasional Sekolah," *Jurnal Basicedu* Vol. 5, No (2021),h.2.

⁶Moh. Yamin, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Ketetapan Penyaluran BOS Tingkat SDN Di Kabupaten Banjar," *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin* Vol. 12. No. 1. (2018). h. 47.

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah menjadi budaya yang baik untuk dipraktikkan dalam menghindari hal – hal yang dapat menyebabkan pengelolaan dana BOS kurang tepat sasaran.

Kepala sekolah sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS perlu melibatkan seluruh komponen- komponen yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan pengawasan dana BOS tersebut. Komponen- komponen yang dimaksud meliputi komite sekolah, Bendahara serta guru.⁷ Kepala sekolah disini sebagai penggerak yang memegang kunci maju mundurnya sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang telah direncanakan dalam pengembangan sekolah secara keseluruhan., baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang.⁸

Namun pada kenyataanya pengelolaan dana BOS terkadang mengalami beberapa kendala – kendala. diantaranya keterlambatan dalam pencairan dana BOS, kelengkapan berkas dalam pembukaan rekening, perbedaan antara perencanaan dan realisasi, hingga penentuan skala prioritas penggunaan anggaran yang relatif belum terencana.⁹ Disamping itu dalam hal pelaksanaan pengelolaan dana BOS, masih ditemukan pengelolaan dana yang tidak transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Masih terdapat pengaduan dari *stakeholder* perihal alokasi dana yang tidak sesuai, penggunaan dana tidak sesuai dengan anggaran.¹⁰ Kecendrungan pengelolaan dana BOS yang kurang transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien berdampak pada adanya kerugian materi dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat.

⁷Budi Ilham Maliki, “Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia,” *Jurnal Tarbawi Stai Al Fitrah* Vol. 4 Nom (2018): 172.

⁸Hotman Simanjuntak Lukman Pardede, “*Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah*,” *Jurnal USM Review* Vol. 4 No (2021), h.896.

⁹Dani Rahman Hakim, “*Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah Kejuruan*,” *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* Vol. 17, no. 1 (2020),h.12.

¹⁰Nugraha Mia Silmi Nurdiani, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah,” *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN* Vol. 6, No (2018), h. 50.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan Di UPTD SD Negeri 73 Parepare. Alasan penulis memilih SD Negeri 73 Parepare sebagai lokasi penelitian karena pada saat observasi awal pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah tersebut sering mengalami kendala terutama masalah pencairan dana BOS yang ada di sekolah yang sering mengalami keterlambatan pencairan dana sehingga fasilitas sarana dan prasarana di sekolah tersebut belum terlalu memadai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare?
2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bentuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare.
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara praktis untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama perkuliahan dan diharapkan dapat meningkatkan minat

peserta didik dalam melanjutkan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan prestasi akademik peserta didik.

2. Manfaat teoritis diharapkan mampu mengembangkan efektivitas pengelolaan BOS Terhadap Mutu Pendidikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang relevan (mirip). Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan upaya pengembangan pengetahuan dari hasil pengelolaan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana, Anak Agung Gede dengan judul penelitian “ Efektivitas Program Dana BOS pada SMP Negeri 4 Serit Kabupaten Buleleng hasil penelitian ini ialah dari input, proses, dan produk sudah termasuk dalam kategori sangat baik. Dan hanya terdapat satu kendala dalam pelaksanaan Dana BOS yang terkait dengan kemampuan kepala sekolah dalam penyaluran Dana BOS.¹¹ Perbedaan penelitian yang dilakukan Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana, dan Anak Agung Gede membahas tentang kendala dan hambatan dalam proses pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana pengelolaan dana BOS terhadap Mutu Pendidikan. Sedangkan persamaan dari penelitian ini sama – sama menggunakan penelitian Kualitatif dan menggunakan informan yang sama.

¹¹Anak Agung Gede Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana, “Efektivitas Program Bantuan Operasional (BOS) Pada SMP Negeri 4 Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesa* (Vol. 6, No 1 2015): h.9.

Kedua hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni dengan judul “ Efektivitas Penegelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di Madrasah. Hasil penelitian ini ialah kinerja dari pengelolaan Dana Pencairan dana yang cenderung terlambat untuk priode Triwulan pertama sehingga menghambat Madrasah untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.¹² Persamaan penelitain Sumarni dengan peneliti ini sama- sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang dana BOS dan Mutu Pendidikan. Perbedaan dari penelitian ini hanya melihat dari 2 indikator saja yaitu waktu dan kinerja, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan melihat dengan beberapa indikator yang bebeda.

Ketiga, Al Maruf “ Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Kota Bima). Hasil penelitiannya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, di SDN 44 Mande Kota Bima dalam pengelolaan dana BOS telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS , faktor pendukung, adapun faktor pendukung dalam pengelolaan dana BOS yaitu, dukungan pemerintah dengan memberikan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dan sosialisasi tentang tata cara pengelolaan dana BOS dari dinas pendidikan, terjalinnya bentuk kerjasama yang baik dari pihak pengelolaan dana BOS, komite sekolah dan para guru, pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima). Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan dana BOS yaitu, waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan, anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehiingga sekolah masih mengalami kekurangan

¹²Sumarni, “Efektivitas Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan,” *Jurnal Edukasi* (Vol. 12. No. 1, 2014): h. 83-98.

ruangan, dan dana BOS belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata/menyeluruh.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama – sama meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana BOS, adapun perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu meneliti tentang efektivitas pengelolaan dana BOS sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di SD Negeri 44 Mande Kota Bima sedangkan peneliti yang akan diteliti mengenai efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah terhadap mutu pendidikan di SD Negeri 73 Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai ketetapan yang akan dituju yang merupakan besarnya kontribusi Output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Suatu tindakan dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³ efektivitas dapat dilihat berdasarkan teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem, kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus input – output yaitu harus mencerminkan hubungan timbal balik antara manajemen berbasis sekolah dan lingkungannya.

Memaknai efektivitas setiap orang memberikan arti yang berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan masing- masing orang. Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang benar atau kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat

¹³Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: 2009), h. 134.

dimana manajer yang efektif adalah manajer yang yang memilih suatu pekerjaan yang benar untuk dijalankan prinsip efektivitas kalau kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur keuangan, bagi seorang manajer dalam setiap operasinya membutuhkan prestasi yang efisien dan efektif.¹⁴ efektivitas dapat dilihat berdasarkan teori sistem dan dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem, kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus input – output yaitu harus mencerminkan hubungan timbale balik antara manajemen berbasis sekolah dan lingkungannya.

Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi angan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitas dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep manajemen keuangan sekolah pengelolaan dana BOS dapat dikatakan efektif jika penggunaannya tepat pada sasaran dan mampu mencapai *outcomes* yang telah ditetapkan.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapain tujuan efektif atau tidak, yaitu :

1. kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
4. Perencanaan yang matang.
5. Penyusunan program yang tepat.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

¹⁴Siswanto., *Pengantar Manajemen*, PT Bumi Aksara. (Jakarta: PT Bumi Aksara 2019), h19.

Efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁵

Adapun Indikator Efektivitas yaitu :

sugiyono dan Budiani menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur Efektivitas adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Ketetapan sasaran program, yaitu bagaimana dapat menentukan proses program sebagai sasaran program. Menurut Makmur ketetapan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.¹⁷
2. Sosialisasi Program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya
3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.¹⁸ Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian – bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.
4. Pemantaun program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut winardi, pengawasan meliputi tindakan mengecek dan

¹⁵Syamsir, *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kulo.* (UIN Alauddin : 2014).

¹⁶Kartika Febri Yuliana, *Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), h. 29-30.

¹⁷Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 8.

¹⁸M.R. Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 7.

membandingkan hasil yang dicapai dengan standar – standar yang telah digariskan.¹⁹ Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya, Selanjutnya menurut Buhari pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya.²⁰

2. Pengelolaan Keuangan Sekolah

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Keuangan sekolah adalah bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah. Dalam buku *pengelolaan lingkungan belajar*, Rita Mariyana, Ali Nugraha dan Yeni Rachmawati menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen yaitu berasal dari kata, “to manage” yang berarti mengatur, melaksanakan, mengendalikan, mengelola, dan memperlakukan. Namun kata manajemen berarti sama dengan istilah “ pengelolaan” yaitu sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan – kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif.²¹

b. Tujuan Pengelolaan Sekolah

Tujuan utama Pengelolaan dana sekolah khususnya keuangan sekolah, terbagi atas 3 bagian yaitu :

1. Menjamin agar dana yang tersedia dapat dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.

¹⁹Winardi, *Kepemimpinan Dalam Manajemen* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h.7.

²⁰Bohari, *Dasar - Dasar Administrasi Dan Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h 5.

²¹ Rita Mariyana, dkk, *Pengelolaan Lingkungan Belajar* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 16.

2. Memelihara barang –barang atau aset sekolah.
3. Menjaga agar peraturan – peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.²²

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 59 dalam pengelolaan dana pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Transparansi berarti adanya keterbukaan, transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan, lembaga pendidikan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak – pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.
- b. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak dari kepala sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab, pertanggung jawaban ini dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.
- c. Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang akan dituju guna mencapai

²²Mulyono, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Yogyakarta: Ar - Ruzz, 2010), h.172.

atau mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas didalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah itu harus benar tepat sasaran.

- d. Efisiensi merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya, serta kesenangan yang dihasilkan. Jadi manajemen keuangan sekolah harus transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam mengelolah uangnya kepada masyarakat, supaya tidak ada lagi yang merasa di rugikan.

c. Proses Pengelolaan Keuangan Sekolah

Terkait dengan manajemen keuangan di sekolah, E Mulyasa mengemukakan bahwa:”²³

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan kompetensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.²⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan sekolah meliputi: sumber keuangan, perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban pelaporan.

²³Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.81.

²⁴E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 227-228.

3 . Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.²⁵

Bantuan BOS adalah biaya operasi dan non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai suatu pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dalam proses perencanaan pengelolaan Dana BOS komponen yang terlibat didalam pengelolaan dana Bantuan BOS adalah kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Proses perencanaan diawali dengan menyusun Rencana Kegiatan Alokasi Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) oleh tim manajemen BOS, guru, dan komite sekolah selanjutnya melibatkan stakeholder sekolah yakni pihak – pihak yang berkepentingan dengan sekolah.

Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala sekolah, bendahara, guru dan komite sekolah sebagai tim dana BOS yaitu:

1. Mengisi dan memutakhirkan data seklah lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi sekolah.
2. Bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam dapodik.
3. Menyusun Rencana Kegiatan Alokasi Kegiatan dan Anggaran (RKAS) yang mengacu pada prinsip – prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

²⁵ Kemendiknas, *Petunjuk Teknis Penggunaan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah*, (Jakarta : Dekdikbud, 2014), h.2.

4. Melakukan input Rencana Kegiatan Alokasi dan Anggaran (RKAS) pada sistem yang telah disediakan oleh kementerian.
5. Memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS regular.
6. Menyelenggarakan keadministrasian pertanggung jawaban penggunaan dana BOS regular secara lengkap.
7. Melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman Bos. Kemdikbud. G.id.
8. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS.
9. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS regular yang diterima.
10. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Regular maupun dari sumber lain.
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas di atas dapat terlaksana dengan baik, maka kepala sekolah perlu melakukan kordinasi atau rapat kerja tim, kebijakan tentang BOS regular, membagi tugas siapa dan mengerjakan apa, memahami prinsip-prinsip penggunaan dana BOS, dan melakukan monitoring dan evaluasi kerja tim.

a. Regulasi dan mekanisme Pengelolaan dana BOS

Pengelolaan dana BOS regular di sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:²⁶

Besaran alokasi dana BOS terdiri atas:

- a. besaran alokasi dana BOS regular

²⁶Salinan Lampiran Peraturan Menteri Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Bantuan Operasional Sekolah Regular, h. 5.

b. besaran alokasi dana BOS kinerja

1. besaran alokasi dana BOS regular sebagaimana yang dimaksud pasal 22 dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS regular pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik.
2. Besaran biaya dana BOS regular pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan menteri.
3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan peserta didik yang memiliki NISN pada satuan pendidikan penerima dana BOS regular berdasarkan data aplikasi dapodik pada tanggal 31 agustus tahun anggaran sebelumnya.
4. Perhitungan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud ayat 3 untuk SMP, SMA penerima peserta regular yang berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan total jumlah peserta didik yang disatukan dengan sekolah induk.

Dalam hal SDLB, SMPLB, SMALB, SLB, sekolah terintegrasi dan satuan pendidikan yang berada di daerah khusus yang ditetapkan sebagai penerima dana BOS regular memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60 maka jumlah peserta didik untuk penghitung besaran alokasi dana BOS regular ditetapkan 60 peserta didik.

Adapun mekanisme pengelolaan dana BOS yaitu:.

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suatu sekolah.
2. Perencanaan ini mengacu pada suatu hasil evaluasi diri sekolah.
3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS regular sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah yang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS regular.

4. Penggunaan dana BOS regular hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan yang ada di sekolah dan tidak ada intervensi pemotongan dari pihak manapun.
5. Penggunaan dana BOS regular harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim Bantuan BOS sekolah, guru, serta komite sekolah. Hasil kesepakatan diatas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditanda tangani oleh peserya rapat.
6. Pengelolaan dana BOS regular di sekolah dilakukan oleh tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah.

b. Tujuan dana BOS

Menurut buku petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan dana BOS, secara umum program BOS bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat yang secara umum program Dana BOS bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus program Dana BOS bertujuan untuk:²⁷

1. menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya pendidikan sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. menggratiskan seluruh siswa SD Negeri maupun SMP Negeri biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).PKPS- BBM (Program Kompensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak) bidang pendidikan, karena hampir semua komponen dari ketiga program tersebut dibiayai oleh pemerintah.
3. Meringankan beban biaya operasioanal sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Hal tersebut menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat pada

²⁷ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 511 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019. h.3

penuntasan wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta. Sekolah program kejar paket A dan B Serta SMP terbuka tidak termasuk dalam sasaran dari pembelajaran PKPS- BBM (Program Kompensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak) bidang pendidikan, karena hampir semua komponen dari ketiga program tersebut dibiayai oleh pemerintah.

4. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu.
5. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Namun secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, perencanaan program dilakukan secara terpusat yang dapat dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama. Pengelokasian jumlah penerima BOS dilakukan oleh TIM PPKS BBM pusat yang penetapannya berdasarkan data yang diusulkan dan setelah memperoleh verifikasi dari tim PPKS BBM kabupaten/kota yang selanjutnya menetapkan sekolah penerima dana BOS.

c. Komponen Pembiayaan dana BOS

Penggunaan dana BOS di satuan pendidikan harus berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, kepala sekolah, bendahara, dewan guru, komite sekolah. Hasil dari kesepakatan tersebut harus dituangkan

Banyak komponen yang berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah seperti siswa, guru, kurikulum, pengelolaan sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan dana, supervisi, dan hubungan sekolah dengan lingkungan.²⁸

²⁸ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2008).

Hasil dari kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang ditanda tangani oleh para peserta rapat. Kesepakatan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus berdasarkan skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standard pelayanan yang minimal dan standard nasional pendidikan.

Dana BOS yang akan diterima oleh satuan pendidikan, dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sebagaimana penjelasan berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan²⁹

- a. Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang akan digunakan oleh satuan pendidikan.
- b. Membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi Standar Pelayanan minimal.
- c. Pemeliharaan buku atau koleksi perpustakaan.
- d. Peningkatan Kompetensi tenaga perpustakaan.
- e. pemeliharaan perabot perpustakaan.
- f. Pengembangan database perpustakaan
- g. pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan

2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru³⁰

- a. semua jenis pengeluaran dalam rangka penerimaan peserta didik baru termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama.
- b. Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen

²⁹ Suhriyatul Hasanah, 'Implementasi Program Pengembangan Mutu Sarana Prasarana Perpustakaan Melalui Penataan Ruang Perpustakaan Sman 1 Ciomas', Tarbawi: *Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 3, no. 02 (2017): h. 225–34.

³⁰ Miftahus Sholihin and Siti Mujilahwati, 'Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web (Online) Di SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring Lamongan', *Jurnal Teknik* 6, no. 1 (2014): h. 557–60.

- c. Pembuatan spanduk sekolah bebas pengutan

3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

- a. Membeli dan mengganti alat peraga IPA yang diperlukan satuan pendidikan untuk memenuhi SPM di tingkat SD
- b. Mendukung penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif pada tingkat SD.
- c. Pengembangan pendidikan karakter atau penumbuhan budi pekerti.
- d. Pemantapan persiapan ujian
- e. Pembelajaran remedial dan pengayaan.
- f. Olahraga, kesenian, karya ilmiah, remaja, pramuka dan palang merah remaja.
- g. Usaha kesehatan sekolah (UKS)
- h. Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan.
- i. Pembiayaan lomba- lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah atau pemda, termasuk biaya untuk transportasi dan akomodasi peserta didik dalam rangka mengikuti lomba dan biaya pendaftaran mengikuti lomba.

4. Kegiatan Ulangan dan Ujian

- a. Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas dan ujian sekolah.
- b. Komponen pembiayaan dari kegiatan diatas dapat dibayarkan adalah fotocopy atau penggandaan soal, fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan orang tua.

5. Pembelian Bahan Habis Pakai

- a. Pembelian buku tulis, kapur, spidol, pensil, pulpen, kertas, bahan pratikum, buku induk peserta didik, buku inventaris.
- b. Pembelian alat tulis kantor seperti, tinta printer dan flash disk.
- c. Pembelian makanan dan minuman untuk kebutuhan sehari-hari di satuan pendidikan.
- d. Pengadaan suku cadangan alat kantor
- e. Pembelian alat – alat kebersihan

6. Langanan Daya dan Jasa

- a. Biaya langganan listrik dan air
- b. Membeli genset atau jenis lainnya yang cocok di daerah tertentu seperti panel surya.

7. Perawatan Sekolah atau Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah

- a. Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela.
- b. Perbaikan meubel, termasuk pembelian meja dan kursi peserta didik.
- c. Perbaikan sanitasi sekolah seperti WC untuk menjamin WC peserta didik berfungsi dengan baik.
- d. Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan.
- e. Perbaikan lantai atau keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

8. Pembayaran Honorarium Bulanan

- a. Guru honorer³¹
- b. Tenaga administrasi Sekolah.
- c. Pegawai perpustakaan.
- d. Penjaga Sekolah.
- e. Petugas Satpam.

³¹ Hidayat Mustafid, 'Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Budaya Organisasi', *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 3, no. 01 (2017), h. 1–14,

- f. Petugas Kebersihan.

9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

- a. Kegiatan KKG atau KKKS bagi satuan pendidikan yang diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila
- b. Menghadiri Seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh satuan pendidikan. Biaya yang dapat dibayarkan adalah biaya pendaftaran dan akomodasi apabila seminar diadakan diluar satuan pendidikan.
- c. Mengadakan workshop lokal karya untuk peningkatan mutu, seperti dalam rangka penentuan penetapan kurikulum atau silabus, penentuan kapasitas guru dalam rangka penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran, pengembangan dan penerapan program penilaian kepada peserta didik.

4. Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Secara umum mutu pendidikan merupakan suatu gambaran karakteristik yang menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan, dalam konteks pendidikan, mutu pendidikan ialah hal yang mengacu pada konteks hasil pendidikan pada prestasi yang akan dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu, prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis maupun non akademis.³²

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dimaksudkan dalam hal yang mengacu kepada input, proses, dan output pendidikan. Input adalah tempat tersedia

³² Muhammad Fadhli, 'Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan', TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan 1, no. 2 (2017): h.215–40,

berlangsungnya suatu proses yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan- harapan sebagai pemandu keberlangsungannya proses. Input terbagi menjadi empat yaitu :

1. Input Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi kepala sekolah, guru, pengawas, staf TU, dan siswa.
2. Input Sumber Daya meliputi peralatan, perlengkapan, uang, dan bahan.
3. Input Perangkat meliputi struktur keorganisasian, peraturan perundang – undangan, deskripsi tugas, kurikulum, rencana dan program.
4. Input Harapan yang meliputi, visi, misi, strategi, tujuan dan sasaran sekolah.

Proses pendidikan dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemanduan input sekolah dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu mendorong motivasi belajar peserta didik dan mampu memberdayakan peserta didik.

Output pendidikan adalah kinerja sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan, output pendidikan dapat dinyatakan tinggi jika prestasi sekolah tinggi dalam hal akademik maupun non akademik dan prestasi kinerja sekolah dan guru meningkat.

Terdapat 5 (lima) dimensi pokok yang dapat menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan, yaitu:

1. Keandalan (*reability*), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara tepat waktu, akurat, dan memuaskan.

2. Daya tangkap (*responsiveness*), kemauan para tenaga kependidikan untuk membantu para peserta didik dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Proses pembelajaran ini hendaknya diupayakan interaktif dan memungkinkan para peserta didik mengembangkan kreatifitas, kapasitas, dan kapabilitas.
3. Seluruh tenaga kependidikan harus benar – benar kompeten dibidangnya masing – masing dimana pendidikan yang positif di mata masyarakat, sikap dan perilaku seluruh tenaga kependidikan mencerminkan profesionalisme dan kesopanan.
4. Empati, yaitu memudahkan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik antara murid dan guru.
5. Bukti langsung (*tangible*), yaitu fasilitas fisik, perlengkapan, tenaga kependidikan dan sarana komunikasi.³³

b. Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah memerlukan pola pemikiran yang mengandung sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan membutuhkan, saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

Selain itu ada beberapa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Guru

³³E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 227-228.

Guru yang telah memiliki posisi yang sangat penting dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Salah satu cara meningkatkan kualitas guru yaitu mengikuti penataran atau memperbanyak membaca.

2. Peningkatan materi pembelajaran

Peningkatan mutu pendidikan berupa materi dapat dilakukan dengan cara memberikan atau menambah lebih luas akan pengetahuan.

1. Peningkatan dalam penggunaan metode

Metode adalah alat yang akan dipakai untuk mencapai tujuan, maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan mutu pendidikan perlu adanya peningkatan pendidikan dalam pemakaian metode.

2. Peningkatan sarana

Sarana merupakan alat atau metode yang digunakan dalam rangka peningkatan efektivitas komunikasi dan interaktif edukatif antara pendidik dan peserta didiknya.

3. Strategi dalam peningkatan mutu pendidikan

Komponen pendidikan harus senantiasa berorientasi pada pencapaian mutu. Semua program dalam kegiatan pendidikan serta pembelajaran yang ada dilembaga pendidikan pada dasarnya harus bisa diarahkan pada pencapaian mutu. Persoalan mutu hingga saat ini masih menjadi pembahasan diantara idealism, yang belum menjadi realitas dalam lembaga pendidikan, maka perlu dikerahkan semua pikiran, tenaga, strategi untuk bisa mewujudkan mutu

tersebut kedalam lembaga pendidikan.³⁴itu pendidikan perlu adanya peningkatan pendidikan dalam pemakaian metode.

4. Peningkatan sarana

Sarana merupakan alat atau metode yang digunakan dalam rangka peningkatan efektivitas komunikasi dan interaktif edukatif antara pendidik dan peserta didiknya.

5. Strategi dalam peningkatan mutu pendidikan

Komponen pendidikan harus senantiasa berorientasi pada pencapaian mutu. Semua program dalam kegiatan pendidikan serta pembelajaran yang ada dilembaga pendidikan pada dasarnya harus bisa diarahkan pada pencapaian mutu. Persoalan mutu hingga saat ini masih menjadi pembahasan diantara idealism, yang belum menjadi realitas dalam lembaga pendidikan, maka perlu dikerahkan semua pikiran, tenaga, strategi untuk bisa mewujudkan mutu tersebut kedalam lembaga pendidikan.³⁵

c. Indikator – indikator Peningkatan Mutu Dalam Pendidikan

1. Dilihat dari profesionalitas guru

- a. Seseorang guru harus menguasai materi pelajaran dan iptek.
- b. Guru juga harus mempunyai sikap dan perilaku yang dapat diteladani.
- c. Guru memiliki kecintaan dan berkomitmen terhadap profesi.

³⁴Mujamil Qamar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Surabaya: PT Erlangga, 2007),h.204.

Mujamil Qamar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Surabaya: PT Erlangga, 2007),h.204.

- d. Guru menjadi motivator agar peserta didiknya aktif mengikuti pelajaran.
- e. Guru harus menguasai berbagai strategi pembelajaran dan teknik penilaian.

2. Kurikulum

- a. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- b. Pengembangan kurikulum mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Program pembelajaran disusun secara sistematis dan komprehensif.
- d. Program pembelajaran mendukung aspek spiritual, intelektual, sosial, emosional, kinestetik.
- e. KBM dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin.

3. Sarana dan prasarana dan sumber belajar

- a. Dimanfaatkan sumber belajar yang bervariasi, termasuk lingkungan.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar dan pembelajaran.
- c. Sarana dan sumber belajar mudah diperoleh oleh setiap peserta didik.
- d. Tersedianya buku perpustakaan, koleksi pustaka dan pelayanan yang memadai.
- e. Tersedianya buku pelajaran yang bermutu dan layak, sesuai dengan jumlah peserta didik.

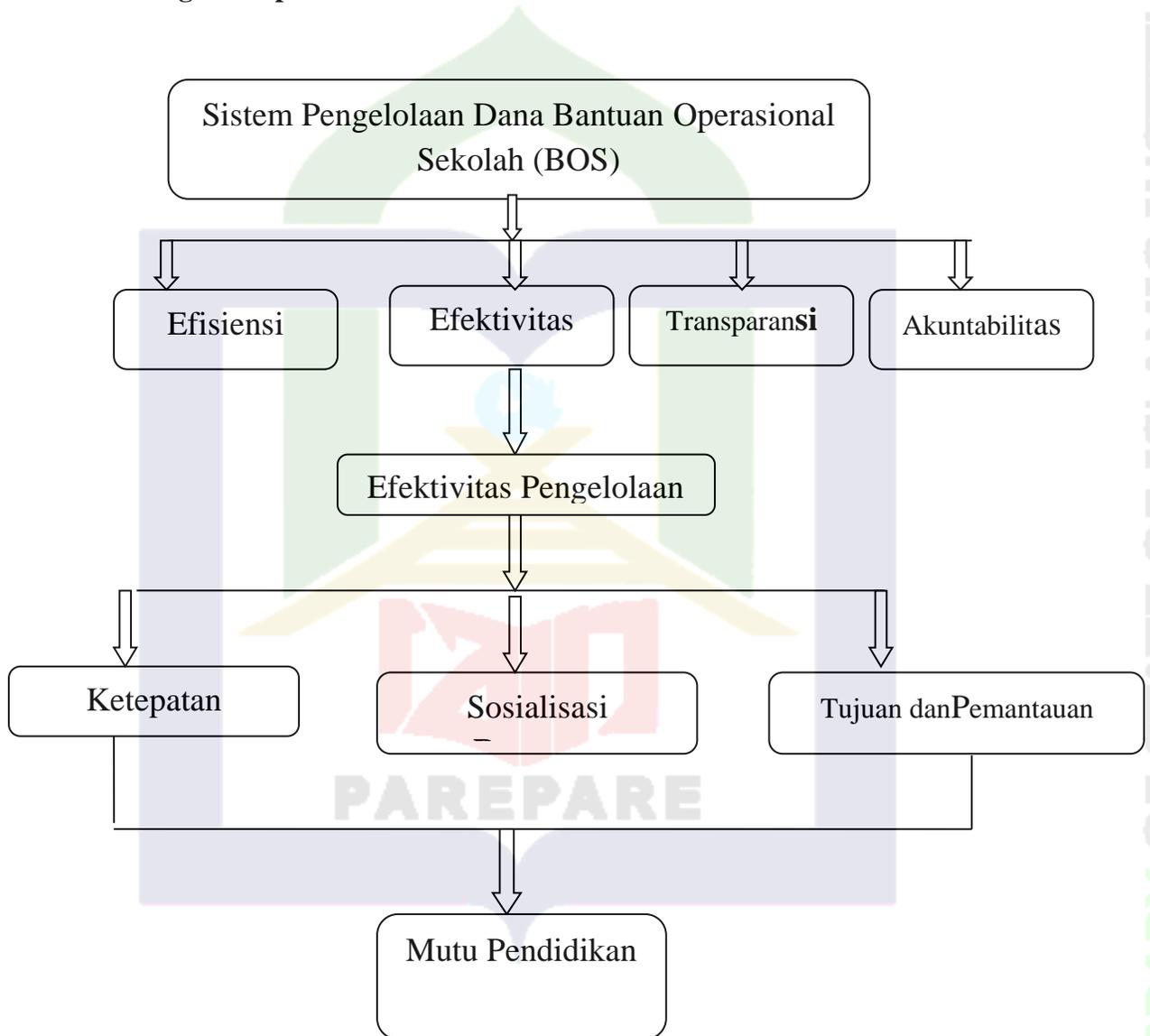
- f. Dimanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran.
- g. Pengaturan sarana dan prasarana yang menjadi keamanan, kebugaraan, kesehatan dan kenyamanan dalam belajar.
- h. Tersedianya laboratorium, fasilitas olahraga, dan ruang kreatif yang diperlukan.

Dari indikator-indikator peningkatan mutu pendidikan yang ada di atas peneliti berfokus pada satu indikator yaitu sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

C. Kerangka Konseptual

- a. Pengelolaan dana BOS efektif jika dalam pengelolaan dana BOS sudah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan Juknis. Dalam pengelolaan BOS harus ada perencanaan dan pengawasan agar dalam pengelolaan program BOS dapat membantu meningkatkan Mutu pendidikan adapun data pengelolaan dana BOS yaitu dari tahun 2020 Triwulan II.
- b. Mutu Pendidikan mengacu kepada input, proses, dan output pendidikan. Input adalah tempat tersedia berlangsungnya suatu proses pembelajaran yang dilihat dari indikator mutu pendidikan seperti profesionalitas guru, kurikulum, sara dan prasarana yang akan menunjang mutu pendidikan.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jika dilihat dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggunakan data yang memanfaatkan data deskriptif, baik berupa kata yang tertulis maupun lisan dari pelaku yang dapat diamati.³⁶ Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.

Sedangkan dilihat dari jenis penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.³⁷ Jadi penelitian ini akan membahas efektivitas pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di UPTD SD Negeri 73 Parepare, yang berada di Jalan Laupe, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

³⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.105.

³⁷Suharismi Arikunto, *Dasar Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), h.58.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁸Jenis data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder;

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung tanpa melalui pihak perantara dari subjek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber data yang dicari.³⁹ Untuk bisa mendapatkan data primer, peneliti wajib mengumpulkan data secara langsung dilapangan dengan teknik yang digunakan peneliti yaitu, wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁰Data yang tidak langsung disini dimaksud adalah data yang melalui perantara, diperoleh oleh dan dicatat terlebih dahulu oleh pihak lain yakni berupa buku, artikel/jurnal, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen- dokumen dalam penelitian ini berupa foto dan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

³⁸Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.107.

³⁹Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h.91.

⁴⁰Amiruddin and Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.326.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan memperjelas relevansinya dengan data yang dikumpulkan peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada efektivitas pengelolaan dana BOS terhadap mutu pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik atau metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang tersusun secara sistematis dan standar guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu kegiatan percakapan yang bertujuan untuk membahas suatu masalah tertentu yang dinyatakan dengan tanya jawab secara lisan, dimana ada dua orang atau lebih yang saling berhadapan dalam bentuk fisik. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data berupa informasi yang sangat jelas untuk subjek penelitian.⁴¹ Pedoman wawancara yang dilakukan oleh peneliti berupa inti dari permasalahan yang akan ditanyakan.⁴² Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yaitu kepala sekolah, komite sekolah, bendahara, guru di UPTD SD Negeri 73 Parepare.

2. Dokumentasi

⁴¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.160.

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), h.197.

Dokumentasi adalah suatu catatan berbagai kejadian yang telah berlalu berupa tulisan, gambar, atau sebuah karya yang penting bagi seseorang. Untuk mengumpulkan sebuah data yang lengkap dan terpercaya maka peneliti menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data yang akurat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴³ Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara dilihat kemudian dicatat untuk dijadikan suatu laporan yang tersedia, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.

3. Matriks

Secara umum matriks penelitian adalah sekumpulan angka yang mewakili tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, matriks dikembangkan untuk menjelaskan data yang terkandung dalam pedoman wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

a. Trianggulasi

Trianggulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai sebuah pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Dengan begitu, maka trianggulasi dikelompokkan menjadi trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data, dan trianggulasi waktu.

1) Trianggulasi sumber

Trianggulasi sumber berfungsi untuk menguji data secara kredibilitas dengan cara memeriksa data yang telah dihasilkan melalui berbagai sumber. Namun dengan pendapat berbagai sumber tidak dapat disamaratakan seperti dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian

⁴³I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bandung: Nilackra, 2018), h.65.

kualitatif, data dari pandangan setiap orang harus dideskripsikan dan dikategorikan, sehingga data yang telah dianalisis peneliti menghasilkan kesimpulan yang kemudian akan dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan berbagai sumber data diatas.

2) Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik berfungsi untuk menguji data secara kredibilitas dengan cara memeriksa data dari sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Teknik yang dilakukan dapat berupa wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian kuesioner. Jika dengan melakukan berbagai teknik tersebut memperoleh data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi kembali ke sumber data yang bersangkutan atau sumber yang lain, untuk dipastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang sumber berbeda-beda.

3) Trianggulasi Waktu

Trianggulasi waktu juga berperan dalam mempengaruhi kredibilitas data. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak pikiran mengenai masalah-masalah sehingga data yang diberikan menjadi lebih valid dan menjadi kredibel. Untuk itu dalam rangka uji kredibilitas data dapat melakukan pengecekan dengan teknik wawancara, observasi, atau berbagai teknik yang lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Jika hasil uji data yang dilakukan berbeda-beda, maka harus dilakukan uji data berikutnya sampai menemukan kejelasan dan kebenaran data tersebut.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode/tanda dan mengkategorikannya sehingga di peroleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di jawab, melalui serangkaian aktifitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa di sederhanakan untuk akhirnya bisa di pahami dengan mudah.⁴⁴

Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal.⁴⁵ Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berkelanjutan berulang dan terus menerus. Dalam hal ini, terdapat tiga tahapan yang harus di kerjakan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu;

1. Reduksi data

Mereduksi/reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstrasikan serta menginformasikan serta mentransformatikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁴⁶ Data yang didapat di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci.

⁴⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 209.

⁴⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 106-107.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, R&D)*, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 338

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kusus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Melalui analisis data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami.

Dalam penelitian ini data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi, tabel, dan di dukung dengan matriks instrumen penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai lapangan.

Penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Pertama*, menyusun simpulan sementara. Dikatakan sementara karena selama penelitian berlangsung akan diperoleh data tambahan, maka dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari data-data yang ada dan melakukan diskusi dengan teman sejawat dengan tujuan agar data diperoleh lebih tepat dan objektif.
- b. *Kedua*, menarik kesimpulan akhir dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare

Bentuk pengelolaan dana BOS merupakan program sekolah yang dapat dilihat dari pengelolaan dana BOS itu sendiri, yang melalui beberapa prosedur pengelolaan yang sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS dari pemerintah. Dana BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar.

Dalam menjalankan pengelolaan dana BOS, tentu adanya dukungan penuh dari kepala sekolah yang menjadi salah satu pengelola dari dana BOS sekolah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, kepada Bapak Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. yaitu :

“Pengelolaan dana BOS di Sekolah ini, belum terlalu memadai terutama dari segi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, dimana dalam pembelian barang atau sarana dan prasarana misalnya papan tulis yang harus pembeliannya melalui aplikasi SIPLAH (Sistem Informasi Pengelolaan Sekolah) atau online dalam pembelian lewat SIPLAH ini terkadang harga barang terlalu mahal dibandingkan dengan harga yang ada ditoko, belum lagi pihak sekolah harus menunggu pemesanan sampai ke sekolah ditambah lagi dengan adanya biaya administrasinya. Kemudian masalah kedua yaitu sering mengalami keterlambatan pencairan dana BOS yang ada disekolah, tentu aplikasi tersebut tidak bisa digunakan jadi sarana dan prasarana di sekolah mengalami kekurangan dikarenakan masalah dana BOS.”⁴⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare masih kurang memadai dikarenakan dalam

⁴⁷ H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara* di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

pembelian sarana dan prasarana sekolah harus menggunakan aplikasi SIPLAH akan tetapi melalui aplikasi tersebut terkadang harga barang yang ada di SIPLAH relatif mahal, belum lagi pemesana di luar daerah, yang harus menunggu barang akan sampai kesekolah, kemudian dari keterlambatan pencairan dana BOS yang sering mengalami keterlambataan.

Bentuk pengelolaan dana BOS dikemukakan oleh Ibu Hj. Hastuti, S.Pd., selaku Bendahara mengatakann bahwa :

“Menurut saya pengelolaan dana BOS ini sering mengalami keterlambatan pencairan dana, sehingga sarana dan prasarana di sekolah sering mengalami kekurangan, seperti peralatan pendidikan, media pedidikan, buku dan sumber belajar lainnya, terutama pada buku pelajaran dan media pendidikan, siswa sering mengalami kekurangan buku paket, terkadang siswa yang dibagikan buku paket di lihat dari jarak rumahnya masing-masing karena 1 buku biasanya 2 orang, kemudian media pendidikan seperti alat peraga praktek di sekolah ini masih kurang, yang dimana alat media praktek ini sangat dibutuhkan siswa . sarana dan prasarana sekolah tentunya harus ditambah karena sarana prasarana sekolah ini dapat menunjang mutu pendidikan sekolah.”⁴⁸

Dari hasil wawancara dengan Bendahara sekolah dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare, belum baik karena pencairan dana BOS sering mengalami keterlambatan, jadi sarana dan prasarananya pun masih mengalami kekurangan terutama buku paket dan media pendidikan yang sangat dibutuhkan demi menunjang mutu pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dari salah satu guru Ibu Nettinawati, S.Pd. yaitu :

⁴⁸ Hj. Hatuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara* di Parepare Pada Tanggal 20 Desember 2022

“Iya, benar adanya pengelolaan dana BOS di sekolah ini belum terlalu baik, yang dalam pengelolaannya sering mengalami keterlambatan pencairan dana BOS, yang mengakibatkan sarana dan prasarana di sekolah ini kurang.”⁴⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS dapat berjalan dengan baik jika pencairan dana BOS tidak mengalami keterlambatan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Komite sekolah yakni Bapak Rudi, S.Pd. yaitu:

“Pengelolaan dana BOS sekolah ini belum terlalu baik, mengapa saya katakan, dapat kita lihat dari segi pencairan dana BOS, segi sarana dan prasarana yang belum memadai, dalam pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan tentu tentunya berdampak kepada sarana dan prasarana sekolah dari kurangnya buku bahan ajar bagi siswa, keterlambatan gaji guru yang non PNS, dan pembiayaan listrik dan air yang tidak mungkin ditunda pembayarannya.”⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa pengelolaan dana BOS belum terlalu memadai dari segi sarana dan prasarana maupun dari segi pencairan dana BOS itu sendiri. Yang dimana dengan adanya keterlambatan tersebut sehingga sarana dan prasarana di sekolah belum mengalami penambahan atau dalam artian masih kurang, kemudian gaji non PNS pun mengalami keterlambatan, dan biaya pembayaran listrik dan air pun memangaki uang pribadi kepala sekolah karena listrik dan air memang harus cepat dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran.

Adapun hasil Wawancara kepala sekolah mengenai berapa banyak dana yang diterima pada tahun 2020 pada Triwulan II yaitu :

“Pada anggaran dana pada triwulan kami menerima dana sebesar Rp.46.800.000 pada tahap ke III tersebut dana di gunakan untuk program-program sekolah yang diantaranya, peserta didik baru, pengembangan

⁴⁹ Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara* di Parepare, Pada Tanggal 22 Desember 2022.

⁵⁰ Rudi, S.Pd, Komite UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara* di Parepare, Pada Tanggal 22 Desember 2022.

perpustakaan, kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi Pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, layanan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multi media pembelajaran, pembiayaan honor.”⁵¹

1. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal membutuhkan uang dalam mengelola sumber daya sekolah, keuangan dan pembiayaan sekolah berkaitan dengan manajemen keuangan sekolah dituntut untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan sekolah secara Transparansi, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin meningkat.”⁵²

a. Transparansi

Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah berarti keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat mencitakan kepercayaan timbale balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi yang menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

⁵¹ H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.*

⁵² Sutomo, *Manajemen Sekolah*, (Semarang: UPT Unnes Press, 2011), h. 11.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Sekolah mengenai transparansi Penegelolaan Keuangan yaitu:

“Sekolah menyediakan informasi dimulai dari awal tahun dengan membuat RKAS yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap kegiatan pendidikan yang ada di sekolah dan selalu membuat laporan keuangan yang dilaporkan pada setiap akhir tahun dan memberikan akses kepada pihak- pihak yang membutuhkan akses tentang pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah dan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang transparan kita melakukan pencatatan secara terbuka, dimana pertemuan rapat kerja pengelolaan keuangan sekolah memperlihatkan buku KAS sekolah dimana setiap anggaran dana yang masuk, dana yang keluar diperuntukan untuk diketahui oleh semua guru, komite dan semua pihak-pihak sekolah maupun masyarakat. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat dan orang tua siswa karena pengelolaan dana BOS dilakukan secara terbuka dibuktikan dengan pertanggung jawaban akuntabilitas dari sekolah kepada masyarakat”⁵³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyediaan informasi dana BOS secara transparan dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat dari laporan RKAS sekolah yang dilaksanakan pada akhir tahun, pencatatan secara terbuka dengan pihak sekolah dengan memperlihatkan buku KAS pemasukan dan pengeluaran dana BOS tersebut.

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:

“Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah dilakukan secara transparan bahwa pencatatan dana BOS dibuku Kas sekolah yang dilakukan secara transparansi dengan menyertakan bukti-bukti kwitansi

⁵³ H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.*

pengeluaran yang dilakukan oleh pihak sekolah, pengelolaan dana BOS yang transparan juga dapat dilihat dari RKAS sekolah yang sudah tertempel di papan informasi yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa. Siapa saja yang membutuhkan informasi dapat dilihat melalui papan informasi, mereka dapat mengetahui berapa jumlah dana yang diterima di sekolah dan berapa jumlah pengeluarannya.”

⁵⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara pengelolaan dana BOS secara transparan yaitu dengan cara mengakses informasi yang ada di sekolah melalui papan informasi pengelolaan dana BOS baik itu jumlah dana BOS yang masuk maupun pengeluaran dana yang ada di sekolah.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah yang ketentuannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah diterapkan.

Dari hasil wawancara Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:

“Sekolah membuat laporan penggunaan dana dalam buku KAS sekolah untuk memudahkan dan mengetahui penggunaan dana keuangan sekolah, Akuntabilitas dibutuhkan untuk menjadikan laporan pengelolaan keuangan sekolah menjadi berkualitas dan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan terhadap penggunaan dana BOS dalam penerapan akuntabilitas, dimana tersedianya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anggaran pengelolaan dana BOS seperti RKAS, LPJ, anggaran kegiatan-kegiatan dengan bukti fisik pencatatan penggunaan dana BOS yang sesuai dengan juknis dalam mencapai mutu pendidikan akan tetapi pengelolaan dana BOS secara akuntabilitas belum berjalan

⁵⁴ Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

dengan baik dikarenakan adanya keterlambatan pencairan dana yang sangat berpengaruh terhadap pelaporan penggunaan atau pengeluaran dana BOS.”⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOS dapat dilihat melalui dokumen-dokumen pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah seperti laporan RKAS, LPJ, dan anggaran-anggaran yang masuk maupun pengeluaran dana BOS itu sendiri.

Adapun hasil wawancara dari Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:

“Bentuk prinsip akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh Kepala Sekolah yaitu, pelaporan terhadap masyarakat atau orang tua murid dengan disertai bukti transaksi penggunaan dan pengeluaran dana pada papan pengumuman yang di pajang di luar dinding sekolah, dimana prinsip akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban sekolah terhadap orang tua murid dan komite sekolah dengan cara mempublikasikan dan mensosialisasikan penggunaan dana BOS sesuai dengan juknis pengelolaan dana BOS.”⁵⁶

Dari hasil wawancara dengan bendahara sekolah dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban sekolah terhadap orang tua murid dan komite sekolah dengan cara mempublikasikan dan mensosialisasikan penggunaan dana BOS sesuai dengan juknis pengelolaan dana BOS.

3. Efektivitas

Efektivitas pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah merupakan fasilitas dari dana bantuan operasional sekolah dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan baik untuk kelancaran sekolah agar tercapainya peningkatan kualitas fasilitas yang ada dilingkungan sekolah tersebut. Efektivitas adalah kemampuan

⁵⁵ H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.*

⁵⁶ HJ. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare Pada Tanggal 20 Desember 2022.*

melaksanakan tugas atau penyelesaian pekerjaan tepat waktu agar tercapainya sesuatu yang diinginkan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah yaitu:

“Terkait pengendalian efektivitas dalam pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah yaitu mendahulukan kebutuhan sarana apa saja yang sangat diperlukan itulah yang terlebih dahulu kita dahulukan sambil menunggu pencairan dana BOS seperti kita ketahui bahwa pencairan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sering mengalami keterlambatan sehingga sarana dan prasarana yang ada di sekolah kurang efektif terutama buku paket yang mengalami kekurangan jumlah buku paket tidak sesuai jumlah siswa yang ingin menggunakannya sehingga sangat dibutuhkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.”⁵⁷

Dari Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam efektivitas pengelolaan dana BOS kepala sekolah memprioritaskan sarana dan prasarana yang mendesak digunakan sehingga itu yang akan mereka beli terlebih dahulu.

4. Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan dana BOS dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan suatu pendidikan, prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana BOS merupakan pemberdayaan sumber daya uang sekolah dalam mencapai optimalisasi mutu pendidikan.

Adapun hasil wawancara dari Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:

“Efisiensi pengelolaan dana BOS terhadap mutu pendidikan sangatlah penting. Dimana dalam efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah, prinsip efisiensi dapat di implementasikan dengan efisiensi internal maupun eksternal, efisiensi internal akan menghasilkan output yang

⁵⁷ H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare Pada Tanggal 20 Desember 2022.*

diharapkan dengan biaya minimal, perbandingan antara biaya input dan efektivitasnya dalam mendukung mutu pendidikan sekolah yang bertujuan untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan biaya pendidikan.”⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah merupakan pemberdayaan sumber daya uang sekolah dalam mencapai optimalisasi akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. Prinsip efisiensi merupakan pengelolaan keuangan sekolah digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan secara efisiensi guna meningkatkan kualitas pendidikan seperti pengadaan buku-buku siswa guna menambah wawasan dan ilmu yang dimiliki siswa.

2. Pengelolaan dana BOS

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare.

Tugas dan tanggung jawab sekolah dalam pengelolaan dana Bos salah satunya yaitu penyusunan RKAS, merupakan sistem informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan, dan penataan usaha serta Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana BOS di satuan pendidikan dasar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Sekolah mengenai penyusunan RKAS yaitu:

“Penyusunan RKAS di sekolah dilakukan pada awal tahun, yang telah ditetapkan dan dirapatkan bersama dengan manajemen dana BOS, kepala sekolah, bendahara,

⁵⁸H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.*

guru dan komite sekolah, dimana kepala sekolah sebagai penanggung jawab dari dana BOS.”⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa, penyusunan RKAS dilakukan pada setiap awal tahun anggaran, dimana kepala sekolah sebagai penanggung jawab dari dana BOS dimana dalam penyusunan RKAS ini tentu melibatkan manajemen dana BOS, bendahara, guru., dan komite sekolah.

Kemudian hasil wawancara dari Bendahara sekolah yaitu:

“Penyusunan RKAS di UPTD SD Negeri 73 Parepare dilaksanakan pada setiap awal tahun anggaran, dimana bendahara sebagai yang menanggarkan dana BOS yang ada di sekolah yang disetujui oleh kepala sekolah.”⁶⁰

Hasil wawancara dengan bendahara dapat kita pahami bahwa, penyusunan anggaran dana BS Dilaksanakan pada setiap awal tahun anggaran, dimana bendahara sebagai seseorang yang menanggarkan dana BOS yang ada, kemudian akan disetujui oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dari salah satu guru Ibu Nettinawati, S.Pd. yaitu :

“Iya, penyusunan RKAS tentunya disusun pada setiap awal tahun anggaran, yang biasanya diawali bulan januari, pihak-pihak yang terlibat sudah melakukan penyusunan, saya sendiri sebagai guru tentu tugas saya sebagai pengguna dari dana BOS yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare.”⁶¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, penyusunan RKAS tentunya disusun pada awal tahun anggaran pada bulan januari.

⁵⁹ H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.*

⁶⁰ Hj. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.*

⁶¹ Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 22 Desember 2022.*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, kepada Bapak komite sekolah yaitu:

“Dalam penyusunannya tentunya berdasar pada juknis penyusunan anggaran yang dilakukan pada awal tahun, dimana saya sebagai pengawas jalannya pengelolaan dana BOS setiap tahunnya.”⁶²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam penyusunan RKAS harus berpedoman dengan juknis penyusunan anggaran, dimana dilakukan pada setiap awal tahun anggaran.

b. Mekanisme Pengelolaan dana BOS

Dana Bos dialokasikan oleh pusat berdasarkan jumlah siswa yang ada pada setiap sekolah dimana dalam pengelolaan dana BOS dilakukan pada 3 Tahap berdasarkan permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, mekanisme pencairan dana BOS akan dibagi 3 Tahap Berdasarkan selesainya pelaporan:

- Tahap 1 cair setelah penyampaian laporan penggunaan Dana BOS tahap II tahun sebelumnya
- Tahap 2 cair setelah penyampaian laporan penggunaan Dana BOS III tahun sebelumnya .
- Tahap 3 cair setelah penyampaian laporan penggunaan BOS tahap I tahun anggaran.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:

“Tahap I harus dipertanggung jawabkan pada akhir maret jika dananya keluar (karena terkadang pencairan dana BOS tahap I baru cair dibulan april atau terhadap II) secara teori memang dana BOS cair ditahap I sesuai dengan tahapnya masing-masing akan tetapi secara fakta terkadang sudah masuk tahap II dana BOS tahap I baru cair. Inilah yang sering menjadi kendala pengelolaan

⁶² Rudi, S.Pd. Komite Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara* di Parepare Pada Tanggal 20 Desember 2022.

dana BOS yang pencairannya terlambat sedangkan kebutuhan sekolah sudah harus terpenuhi.”⁶³

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pencairan dana BOS sering mengalami keterlambatan pencairan dimana tahap I pencairan dana baru cair di Tahap II, ini lah yang menjadi salah satu kendala peningkatan sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang Mutu Pendidikan.

Dari hasil wawancara dengan bendahara yaitu:

“Pencairan dana BOS cair per tiga tahap, dimana tahap I sebesar 30% , tahap II 40%, dan tahap ke III sebesar 30% , akan tetapi pencairan dana BOS ini belum sesuai dengan tahap-tahap pencairan dana BOS masing-masing.”⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa pencairan dana BOS dilakukan melalui 3 tahap, yang menjadi kendala yaitu pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan.

d. Mutu Pendidikan

Dana BOS merupakan dana APBN yang digunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu mutu Pendidikan yaitu sarana dan prasarana sekolah yang dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan yang ada, dimana sarana merupakan segala sesuatu yang dapat di gunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan

⁶³ H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara* di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

⁶⁴ Hj. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara* di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

tujuan dari suatu proses produksi. Sementara prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi.

Pendanaan dana BOS non Personalia ini dapat digunakan antara lain untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ektrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pembelian alat Multi media, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan Manajemen sekolah. Dana BOS bagi satuan pendidikan dasar yaitu SD dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dana BOS digunakan untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar, sedangkan dana BOS pada Satuan Pendidikan Menengah (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah terjangkau dan bermutu bagi masyarakat.

Pengelolaan dana BOS merupakan upaya dalam meningkatkan Mutu Pendidikan terutama pada sarana dan prasarana di UPTD SD Negeri 73 Parepare, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, akan tetapi dari hasil wawancara dengan Kepala sekolah tentang sarana prasarana dalam menunjang mutu pendidikan yaitu “

“Sarana dan Prasarana dalam UPTD SD Negeri 73 Parepare ini belum sepenuhnya meningkatkan pendidikan, seperti kita lihat bahwa sekolah masih sangat membutuhkan penambahan buku paket, jika sarana dan prasarana tidak memadai tentu proses pembelajaran akan terganggu dan terhambat apabila lingkungan belajar tidak mendukung, contohnya dalam mencari sumber belajar yang dimana buku yang menjadi sumber utama tentunya dikarenakan buku kurang bagi siswa tentu siswa pun akan kesulitan dalam pembelajaran, bukan hanya siswa guru juga akan mengalami kesusahan jika tanpa adanya media pembelajaran dan buku tentu akan kesusahan dalam proses pembelajaran adapun faktor penghambat sehingga sarana dan prasarana yang ada disekolah kurang memadai disebabkan oleh pencairan dana yang sering mengalami keterlambatan sehingga sekolah belum mampu membiayai seluruh program sekolah secara merata dan menyeluruh,

anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan sekolah, sekolah dibatasi dalam melakukan perbaikan berat sehingga sekolah masih mengalami kekurangan ruangan sekolah. Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan diaman ketiadaan sarana dan prasarana akan mempersulit kegiatan pembelajaran yang nantinya akan memengaruhi mutu pendidikan .”⁶⁵

hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwa sarana dan prasarana di sekolah harus memadai, karena sangat membantu sekolah dalam proses pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penguatan sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah , sarana dan prasarana menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dan dipersiapkan secara matang untuk menjamin kelancaran jalannya pendidikan dan pembelajaran setiap saat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:

“Pada proses pengelolaan dana BOS terhadap sarana dan prasarana belum memadai untuk mencapai mutu pendidikan, seperi kita ketahui bahwa tanpa adanya fasilitas yang baik, maka sulit bagi sekolah untuk mencapai hasil yang kompeten dalam mencapai mutu pendidikan, seperti fasilitas buku, kursi dan media pembelajaran lainnya yang masih kurang terutama buku paket siswa, mereka harus bergiliran untuk menggunakan buku tersebut, sehingga terkadang siswa rebutan untuk mendapatkan buku yang akan mereka gunakan.”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pengelolaan mutu pendidikan terhadap sarana dan prasarana di UPTD SD Negeri 73 Parepare masih belum

⁶⁵ H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

⁶⁶Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

memadai terutama yaitu buku paket yang menjadi sumber ajar dan sumber belajar baik untuk siswa maupun guru.

Adapun upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk menunjang mutu pendidikan atau penambahan sarana dan prasarana dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah yaitu:

“Setiap memasuki ajaran baru para wali kelas melakukan pendataan sarana dan prasarana apa saja yang kurang dan mengalami kerusakan, jika mengalami kerusakan parah pihak sekolah menyimpannya di gudang sebagai bukti, jika mengalami kerusakan ringan maka akan diperbaiki.”⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, setiap tahun ajaran baru pihak wali kelas mendata sarana dan prasarana apa yang kurang dan apa yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Adapun hasil wawancara Guru di UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:

“Dalam pengelolaan dana BOS Khususnya untuk sarana dan prasarana ini sangat menunjang proses pendidikan. Hal yang paling utama dilakukan yaitu pengadaan buku paket yang merupakan sumber belajar siswa yang utama, alokasi anggaran pada pengadaan buku di perpustakaan menjadi wahana bagi peserta didik sekolah, hak sebagai siswa di sekolah artinya menerima buku di perpustakaan menjadi wahana peserta didik. Ketika terjadi kerusakan atau hilangnya buku paket serta tidak layak pakai lagi, maka tugas dari pengelola perpustakaan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa stok perpustakaan wajib ditambah dan ada beberapa buku tidak lagi layak digunakan oleh peserta didik.”⁶⁸

⁶⁷ H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

⁶⁸Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam penegelolaan dana BOS untuk sarana dan prasarana sekolah sangat penting agar kegiatan pembelajaran dapat efektif dan efisien yng dapat menghasilkan mutu pendidikan sekolah. Peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dari pengelolaan dana BOS, tenaga pendidik, kepala sekolah, sarana dan prasarana, dan semua personil yang ada dalam lembaga kependidikan atau sekolah yang merupakan bagian terpenting untuk peningkatan mutu pendidikan efisien yang dapat menghasilkan mutu pendidikan sekolah.

2. Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan

Sebuah organisasi dapat kita katakan efektif jika dalam pengelolaan dana BOS sudah dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan Juknis. Dalam pengelolaan BOS harus ada perencanaan dan pengawasan agar dalam pengelolaan program BOS dapat membantu meningkatkan Mutu pendidikan

a. ketepatan sasaran

Ketepatan sasaran program merupakan sejauh mana peserta didik dengan ketetapan sasarnya, Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. pada penelitian ini ketetapan sasaran program ialah penentuan kepada siapa saja program Dana BOS ditujukan dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai yang sesuai dengan ketetapan pada juknis penggunaan dana BOS untuk membuat program di sekolah. Dimana efektivitas merupakan kesesuain antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan dalam menganalisis dan untuk mengukur ketetapan sasaran Dana BOS.

Dengan adanya dana BOS disekolah maka dapat membantu para peserta didik maupun tenaga pendidik, Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri, dengan adanya pembebasan biaya melalui anggaran dana BOS dari kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan disekolah, seperti mengadakan kegiatan HUT kemerdekaan, kegiatan plomba keolaragaan, tersedianya buku paket disekolah, dengan adanya BOS tidak harus melaksanakan pemungutan biaya kepada guru maupun peserta didik.

Hal ini juga didukung dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu ketetapan sasaran dana BOS secara transparan yaitu:

“Ketepatan sasaran dana BOS ini sudah dilakukan secara transparan dimana dalam pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 membantu siswa yang kurang mampu, belanja non personalia bagi satuan pendidikan dan pembebasan biaya anggaran seperti kegiatan-kegiatan organisasi sekolah, perlombaan sekolah seperti olimpiade, pembelian sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah, perbaikan pembangunan sekolah yang rusak adapun tujuan dari transparansi adalah untuk menimbulkan rasa saling percaya antara pihak sekolah dan masyarakat melalui media informasi yang diberikan oleh pihak sekolah dengan menjamin kemudahan memperoleh informasi tersebut.”⁶⁹

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa ketetapan sasaran dana BOS secara transparan sudah dilakukan dimana sasaran dana BOS ini diberikan kepada siswa yang kurang mampu, pembebasan biaya kegiatan sekolah seperti kegiatan olimpiade, kegiatan HUT Kemerdekaan Indonesia.

⁶⁹ H. andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare* Pada Tanggal 20 Desember 2022.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:

“Sudah tepat sasaran dan transparan, karena dengan adanya dana BOS ini tentu sangat membantu proses belajar mengajar peserta didik, dimana Dana BOS ini digunakan untuk mendanai belanja non porsanalia bagi satuan pendidikan dasar agar dapat menunjang kegiatan belajar.”⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketetapan sasaran dana BOS secara trasparan sangat membantu walaupun terkadang keterlambatan penambahan sarana dan prasarana di sekolah masih sering mengalami keterlambatan karena pencairan dana BOS yang terlambat cair.

Adapun hasil wawancara dari kepala Sekolah mengenai Ketetapan sasaran secara Akuntabilitas Pengelolaan dana BOS diUPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:

“Ketetapan sasaran secara akuntabilitas pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare belum tepat sasaran dimana akuntabilitas pengelolaan dana BOS masih sering mengalami kendala pelaporan penggunaan dana BOS yang ada di sekolah hal ini disebabkan dari keterlambatan pencairan dana BOS itu sendiri.”⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dana BOS secara akuntabilitas belum berjalan dengan baik, dimana pelaporan sasaran dana BOS masih mengalami keterlambatan pelaporan penggunaan dan pengeluaran dana BOS hal ini disebabkan karena proses pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan sehingga akan berdampak pula pada pelaporan pengelolaan dana BOS yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare.

Hal ini didukung dari pernyataan Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:

⁷⁰Hj. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare*, Pada Tanggal 20 Desember 2022..

⁷¹ H. andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare* Pada Tanggal 20 Desember 2022

“Ketepatan sasaran secara akuntabilitas di sekolah ini belum berjalan dengan baik, karena pencairan dana BOS yang sering mengalami keterlambatan sehingga pelaporan penggunaan dana BOS menjadi terlambat, bukan hanya terlambat pelaporan penggunaan melainkan juga berpengaruh pada sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang kurang akan terlambat penambahan seperti buku bahan ajar siswa.”⁷²

Dari hasil wawancara dengan bendahara sekolah dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran secara akuntabilitas di UPTD SD Negeri 73 belum baik, hal ini dipengaruhi dari keterlambatan pencairan dana BOS sehingga pelaporan penggunaan dana BOS mengalami keterlambatan seperti pelaporan RKAS.

Kemudian hasil pertanyaan mengenai ketetapan sasaran secara efektif dan efisien yaitu:

“Ketepatan sasaran secara Efektif dan Efisien belum tepat yaitu dari segi keterlambatan pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, hal ini dapat mempengaruhi operasional sekolah terutama sarana dan prasarana yang ada di sekolah mengalami kekurangan terutama pada pengembangan perpustakaan dimana buku paket untuk siswa tidak mencukupi.”⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketetapan sasaran dana BOS secara efektif dan efisien belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan keterlambatan pencairan dana BOS yang belum sesuai dengan tahap-tahap pencairan sehingga operasional sarana dan prasarana yang ada di sekolah belum memadai.

Adapun hasil wawancara dengan komite sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:

“Secara efektif dan efisien pengelolaan dana BOS di sekolah ini belum berjalan dengan baik, benar adanya bahwa ini dipengaruhi dari keterlambatan pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan sehingga sarana dan prasarana yang ada di sekolah belum efektif dan efisien yang sangat berpengaruh terhadap mutu

⁷² Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare* Pada Tanggal 20 Desember 2022.

⁷³ Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare* Pada Tanggal 20 Desember 2022.

pendidikan, seperti kurangnya buku paket sebagai bahan ajar atau bahan yang akan dipelajari siswa.”⁷⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada komite sekolah dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS secara efektif dan efisien belum berjalan dengan baik hal ini kita lihat dari keterlambatan pencairan dari dana BOS yang berpengaruh terhadap sarana dan prasarana yang akan menunjang mutu pendidikan.

Adapun pertanyaan kepada kepala Sekolah tentang bagaimana mengelola dana BOS agar tepat sasaran yaitu:

“Tentunya adanya pemahaman mengenai Juknis BOS yang bertujuan agar dana BOS dapat dialokasikan tepat pada fungsinya kemudian adanya konsultasi dengan sekolah lain tentang bagaimana cara mereka mengelola dana BOS agar tepat sasaran, diskusi dengan dinas pendidikan tentang prosedur pengelolaan dana BOS, format dana BOS, prosedur pengeluaran dana BOS, dan yang paling penting yaitu hindari niat korupsi dalam pengelolaan dana Usahakan dalam pengelolaan dana BOS jangan sekali-kali ada niat mengambil yang bukan hak milik kita.”⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya kepala sekolah dalam mengelola dana BOS agar tepat sasaran yaitu, Pemahaman juknis pengelolaan dana BOS, konsultasi dengan pihak sekolah lain, diskusi dengan dinas pendidikan, dan hindari niat ingin korupsi.

b. Sosialisasi Program

Sosialisai program merupakan awal penentuan keberhasilan kecaipan program. Sosialisasi program harus dapat dilaksanakan secara sistemati dan terencana.⁷⁶ Mensosialisasikan dana BOS sekolah kepada pihak yang terkait dan

⁷⁴ Rudi, S.Pd, Komite UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare*, Pada Tanggal 20 Desember 2022

⁷⁵ H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare*, Pada Tanggal 20 Desember 2022

⁷⁶ Rizcah Amelia, *Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Anaka Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar* (Makassar: Universitas Hasanuddin), H 73.

wali murid, sehingga nantinya para orang tua dapat mengetahui apa saja yang dibiayai dari dana BOS untuk sekolah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala sekolah UPTD SD Negeri 73 parepare yaitu:

“Cara mensosialisasikannya dengan cara transparansi melalui sistem komunikasi yang sudah canggih, tentunya cara mensosialisasikan bisa lewat online dengan cara membuat grup watsapp antara tenaga kependidikan dan membuat juga grup untuk para wali murid sehingga mempermudah mensosialisasikan program-program apa saja yang akan dibiayai oleh dana tersebut kemudian harus memberitahukan secara tertulis atau transparan kepada orang tua peserta didik dengan cara memasang di papan pengumuman jumlah dana BOS yang diterima sekolah, mempertanggung jawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima, membebaskan iuran dari orang tua siswa.”⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa cara mensosialisasikan dana BOS yaitu transparan, dan dapat dilakukan melalui media komunikasi atau online, yang dapat mempermudah orang tua siswa yang ingin mengetahui program-program apa saja yang akan diadakan oleh sekolah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bendahara sekolah UPTD SD Negeri 73 parepare yaitu:

“Tentunya sosialisai program dana BOS dilakukan secara transparan dimana pihak sekolah merapatkan terlebih dahulu, setiap anggaran kita masukan ke RKAS dan kita adakan rapat dengan kepala sekolah, komite sekolah dan guru. kalau untuk program- program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Tentunya kami mempunyai komite sekolah yang merupakan perwakilan dari semua wali murid yang mana tugasnya mensosialisasikan program- program apa saja yang akan dijalankan disekolah kepada masyarakat.”⁷⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa cara mensosialisasikan dana BOS yaitu transparan, dan dapat dilakukan melalui media komunikasi atau online,

⁷⁷ H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare*, Pada Tanggal 28 Oktober 2022.

⁷⁸Hj. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare*, Pada Tanggal 22 Desember 2022..

yang dapat mempermudah orang tua siswa yang ingin mengetahui program-program apa saja yang akan diadakan oleh sekolah.

Kemudian diperkuat oleh hasil wawancara dari bendahara sekolah yaitu :

“Merapatkan terlebih dahulu, setiap anggaran kita masukan ke RKAS dan kita adakan rapat dengan kepala sekolah, komite sekolah dan guru. Kalau untuk program- program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Tentunya kami mempunyai komite sekolah yang merupakan perwakilan dari semua wali murid yang mana tugasnya mensosialisasikan program- program apa saja yang akan dijalankan disekolah kepada masyarakat.”⁷⁹

Dari hasil wawancara dengan bendahara sekolah dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program dilaksanakan sudah diadakan rapat dengan pihak-pihak sekolah, kemudian untuk sosialisasi program tentunya dengan adanya bantuan komite sekolah yang akan membantu mensosialisasikan program-program sekolah kepada wali siswa.

Hasil wawancara dari Komite Sekolah yaitu;

“Tugas Komite sekolah adalah sebagai perwakilan dari wali murid yang dapat mensosialisasikan program dana BOS kepada orang tua murid tentang program- program yang akan dilaksanakan oleh sekolah untuk menyampaikan usulan atau keluhan yang dirasakan oleh para wali murid.”⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami Bahwa tugas komite sekolah adalah perwakilan dari semua wali murid yang mensosialisasikan program dana bos kepada semua wali murid.

Kemudian hasil wawancara dari Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu:

“Cara mensosialisasinya melakukan rapat terlebih dahulu tentang penyusunan yang melibatkan stakeholder sekolah dan komite sekolah, dan

⁷⁹Hj. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare*, Pada Tanggal 22 Desember 2022..

⁸⁰S.Pd. Rudi, Komite Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare*, pada Tanggal 22 Desember 2022.

rancangan anggaran penggunaan dana BOS dipajang dipapan pengumuman yang dapat diakses oleh warga sekolah dan orang tua murid.”⁸¹

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai sosialisasi program Dana BOS, sudah berjalan baik dimana pihak sekolah sudah mensosialisasikan program dana BOS kepada wali murid baik itu secara online maupun diadakanya rapat tentang bagaimana pengelolaan Dana BOS yang ada disekolah, dan pihak wali murid juga dapat melihat anggaran dana BOS pada papan penggunaan dana BOS yang tersedia.

Kemudian hasil Wawancara sosialisasi program secara akuntabilitas yaitu:

“Untuk mensosialisai program secara akuntabilitas dapat dilakukan dengan memberikan informasi mengenai apa –apa saja biaya penggunaan dana BOS yang ada di sekolah baik itu dana yang masuk maupun dana yang telah digunakan untuk program-program apa saja atau untuk kebutuhan apa saja dana tersebut digunakan yang dapat diakses para orang tua siswa atau murid di papan informasi penggunaan dana BOS.”⁸²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisai program dana BOS yang dilakukan dengan cara akuntabilitas dilakukan dengan memberikan informasi baik itu guru, bendahara dan komite serta wali murid/orang tua bahwa program-program apa saja yang akan dijalankan dan sudah dijalankan, pembiayaan apa saja yang ada di sekolah yang dapat diakses melalui papan informasi penggunaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare yang ada di ruangan Kepala sekolah.

Kemudian Sosialisasi program dana BOS secara efektif dan efisien yaitu:

“Sosialisai program pengelolaan dana BOS sangat perlu dilakukan agar berjalan dengan baik secara efektif dan efisien terutama sosialisasi terhadap masyarakat, dalam hal penggunaan dana harus transparan serta dapat dipertanggung

⁸¹Nettinawati, S.Pd. Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare* Pada Tanggal 22 Desember 2022.

⁸² H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare*, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

jawabkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan juknis pengelolaan dana BOS.”⁸³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program dana BOS sangat perlu dilakukan baik secara transparan, akuntabilitas, efektif dan efisien terutama sosialisasi kepada masyarakat untuk memberi pemahaman tentang program-program apa saja yang ada di sekolah yang menggunakan dana BOS agar masyarakat percaya bahwa dana BOS ini benar-benar dipergunakan dengan baik secara efektif dan efisien.

c. Pemantauan Program

Pemantauan program ialah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu”

“Untuk pengawasan maupun pemantauan program dilakukan secara transparan atau terbuka, pihak sekolah awalnya akan membuat pertemuan untuk menyusun RKAS. Setiap guru juga akan dikumpulkan untuk pengadaan buku paket baru, kemudian untuk pembelian alat media pembelajaran apa saja yang diperlukan, setiap akhir ajaran, bendahara sekolah juga membuat laporan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran pembiayaan Dana BOS.”⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemantau atau pengawasan pengelolaan dana BOS dilakukan secara transparansi, yang dimana pihak pengelola dana BOS melakukan pengelolaan secara terbuka dengan menyusun anggaran yang masuk yang akan dimasukkan ke dalam RKAS, pemantau program dapat dilihat dari buku apa saja yang kurang, media pembelajaran apa yang kurang sehingga dapat dimasukkan ke dalam program pembiayaan dana BOS.

⁸³Hj. Hastuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare*, Pada Tanggal 20 Desember 2022.

⁸⁴Hj. Hastuti, S.Pd, Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara di Parepare* Pada Tanggal 20 Desember 2022.

Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah yang mengatakan:

“Untuk pemantauan program biasanya nanti juga akan diadakan rapat seluruh tenaga kerja terhadap program atau kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah.”⁸⁵

Hasil hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang pemantauan program dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare dengan melihat data rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang telah disusun sebelumnya dengan melihat hasil perbandingan penggunaan anggaran sekolah. Dari hasil pemantauan ini program yang dilakukan UPTD SD Negeri 73 Parepare yang digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Dimana pengawasan yang dilakukan sudah cukup efektif .

Pemantauan Program secara akuntabilitas yaitu:

“Untuk pemantauan program secara akuntabilitas, tentunya dapat dilaporkan setelah penerimaan dan penggunaan dana BOS itu sendiri dimana pelaporannya berupa program-program apa saja yang diadakan di sekolah atau biaya-biaya apa saja yang telah dilakukan di sekolah, tentunya dengan adanya program-program di sekolah tentu juga ada laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS yang disertai dengan bukti-bukti baik itu berupa kwitansi maupun buku KAS sekolah.”⁸⁶

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare secara Akuntabilitas harus dilakukan dengan baik terutama pemantau program-program apa saja yang ada di sekolah dan pengeluaran.

Selanjutnya pemantauan program secara efektif dan efisien yaitu :

“Untuk pemantauan program secara efektif dan efisien tentu sangat perlu dilakukan karena pemantauan program dapat dilihat dari bagaimana seseorang

⁸⁵H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare Pada Tanggal 20 Desember 2022.

⁸⁶ Hj. Hatuti, S.Pd. Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare, Wawancara di Parepare Pada Tanggal 20 Desember 2022

mengelola dana BOS dengan baik, sasaran apa saja yang sudah tepat dengan adanya dana BOS yang bertujuan untuk mencapai efektivitas pengelolaan dana BOS secara efektif, efisien, transparan maupun akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan baik untuk pemerintah maupun masyarakat sehingga pengelolaan dana BOS dapat berjalan sesuai dengan pedoman penggunaan dana BOS.”⁸⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemantaun program dana BOS harus dilakukan secara Efektif dan efisien yang dapat dilihat bagaimana kinerja pengelolaan dana BOS yang ada disekolah apakah sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya.

B. Pembahasan

1. Bentuk Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumber daya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

⁸⁷ Rudi, S.Pd, Komite UPTD SD Negeri 73 Parepare, *Wawancara* di Parepare, Pada Tanggal 20 Desember 2022

Pengelolaan dana BOS belum terlalu memadai karena masih kurang sarana dan prasarana pendidikan yang akan digunakan untuk menunjang mutu pendidikan, hal ini dikarenakan pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan pencairan, dengan adanya pencairan dana BOS tentu dapat langsung dipergunakan oleh sekolah untuk membeli seluruh kebutuhan pembelajaran, seperti mengembangkan perpustakaan hingga dapat mensejahterakan guru honorer.

Program – Program Pembiayaan Dana BOS		
(Sumber UPTD SD Negeri 73 Parepare)		
Komponen	Uraian Pembelian	Jumlah
1. Peserta didik Baru	1. Spanduk (125.000) 2. Honor Peserta didik Baru (1.500.000)	1.625.000
2. Pengembangan Perpustakaan	1. Koran Majalah (630.000)	630.000
3. Kegiatan Pembelajaran Ekstrakurikuler	1. Foto President dan Wakil Presiden (1.120.000) 2. Material (270.000)	1.390.000
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	-	-

5. Administrasi kegiatan sekolah	1. makan dan minum tamu (Rp. 444.800) 2. ATK (Rp. 5.367.200) 3. honor guru (Rp. 1.800.000) 4. panitia pelaksana (1.530.000) 5. Bahan pembersih (1.606.400) 6. penunjang operasional (1.546.500) 7. Obat- obatan (1.261.500)	13.556.400
6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	-	-
7. laganan daya dan jasa	1. retribusi kebersihan (120.000) 2. air (243.360) 3. Vocer internet (10.605.000)	11.209.300
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana	1. bahan bangunan (4. 297.100)	4.297.100
9. Penyediaan alat multi media pembelajaran	Laptop (3. 950.000)	3.950.000
10. Pembiayaan Honor	1. Honor Non PNS (10.200.00)	10.200.000
Jumlah keseluruhan		46.857.800
Dana yang diterima		46.800.000
Dana sisa tahap lalu		122.042
Total dana yang diterima		46.992.042
Sisa		64.242

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan bentuk pengelolaan dana BOS terhadap mutu pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare, yaitu

1. Transparansi

Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah dilaksanakan secara transparansi dengan cara memberikan informasi secara terbuka dilakukan oleh pihak sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah yang sumber dananya dapat diketahui dan dimanfaatkan sebagai informasi keuangan pada papan informasi RKAS pada tahun 2020 baik dari pemasukan sebesar Rp. 46.922.042 dan pengeluaran Rp. 46. 857. 800.

Salah satu tujuan pemberian dana BOS adalah membantu membiayai keperluan sekolah dan peningkatan mutu pendidikan seperti kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur dan proses pembelajaran. Dalam penelitian ini terfokus pada pembiayaan dana BOS pada sarana dan prasarana yaitu, Pengembangan Perpustakaan, Perawatan sekolah, Pembelian bahan habis pakai, dan layanan daya dan jasa.

a) Pengembangan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan layanan kepada siswa maupun tenaga pendidik yang harus bersifat transparan, dari segi pengembangan perpustakaan yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat pada data yang ada di tabel 2. 3 bahwa dana BOS yang masuk ke sekolah pada tahun 2020 tahap II di gunakan sebagai pengembangan perpustakaan untuk pembelian koran dan majalah yang pengeluarannya sebesar Rp. 630.000.

b) Pemeliharaan sarana dan prasarana

Dalam proses pembelajaran, agar peserta didik dapat mengikuti kegiatan dengan baik maka harus ditopang dengan fasilitas seperti dengan adanya sumber bahan ajar yang berfungsi dengan baik contohnya adanya perpustakaan, penyediaan alat multi media, tersedianya buku pelajaran bermutu dan layak sesuai dengan jumlah peserta didik. Kegiatan belajar mengajar akan efektif jika ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berfungsi dengan baik. Transparansi merupakan keterbukaan mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan, pengelolaan keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, terutama pada UPTD SD Negeri 73 Parepare yang pada tahun 2020 tahap II dana BOS dipergunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 4.297.100.

c) Pembelian Bahan habis pakai

Adapun pembelian bahan habis pakai adalah bahan yang digunakan tidak sia-sia dan sifatnya hilang karena diambil manfaat dari barang tersebut Pembelian bahan habis pakai di UPTD SD Negeri 73 Parepare antara lain untuk pembelian, makan dan minum tamu, ATK, bahan pembersih dan penunjang operasional sekolah yang dilakukan secara Transparansi.

d) Layanan daya dan jasa

Dengan adanya layanan daya dan jasa dipergunakan untuk membiayai retribusi kebersihan, air, voucher internet, listrik yang membantu sekolah.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare merupakan pertanggung jawaban terhadap pihak- pihak yang terkait dengan mempublikasikan dan mensosialisasikan penggunaan dana BOS sesuai dengan juknis itu sendiri yang dapat dilihat di RKAS, buku KAS sekolah, LPJ pengelolaan dana BOS yang telah digunakan.

a) Pengembangan Perpustakaan

Secara akuntabilitas pengembangan perpustakaan dapat dilakukan dengan perencanaan atau pertanggung jawaban yang harus *strategic planning* karena sangat memperhatikan stakeholders, pengembangan perpustakaan harus direncanakan program dan kegiatan yang akan dibuat, dengan persetujuan pemimpin. Perpustakaan harus mempertanggung jawaban penggunaan dana yang masuk kepada stakeholders secara transparan sehingga apa yang diperoleh dari publik berapa dana yang diberikan dapat dimengerti benar peruntukannya.

b) Perawatan Sekolah

Dalam pengelolaan keuangan sekolah secara akuntabilitas yaitu penggunaan uang sekolah dapat dipertanggung jawaban sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan dalam peraturan maka pihak sekolah membelanjakan secara bertanggung jawab seperti di UPTD SD Negeri 73 Parepare dari segi perawatan sarana dan prasaran sekolah dipertanggung jawaban dana yang dipakai untuk perawatan sekolah, sesuai dengan data yang ada bahwa dana tersebut dipergunakan untuk pembelian bahan bangunan sekolah di UPTD SD Negeri 73 Parepare.

c) Pembelian bahan habis pakai

Pembelian barang habis pakai merupakan barang yang dapat dipergunakan dalam satu kali pemakaian, agar pembelian bahan habis pakai dapat dipertanggung jawaban secara benar dan akuntabel maka dari pihak sekolah memiliki bukti pembelian bahan habis pakai sehingga dana yang dibayarkan sesuai dengan yang diajukan.

d) Layanan daya dan jasa

Komponen layanan daya dan jasa dapat menggunakan alokasi Dana BOS reguler diantaranya seperti pembiayaan listrik, internet, dan air. Ditambah biaya untuk penyediaan obat-obatan, yang akan dianggarkan pada RKAS yang ada di sekolah.

3. Efektivitas

Efektivitas, yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang terukur dari standar penggunaan dana BOS dalam membantu merealisasikan program yang direncanakan di di UPTD SD Negeri 73 Parepare dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana di sekolah yaitu belum terlalu efektif dikarenakan proses pencairan dana BOS masih mengalami keterlambatan sehingga sarana dan prasarana yang ada di sekolah belum efektif.

a) Pengembangan Perpustakaan

Pengembangan perpustakaan yang ada di sekolah sangat penting untuk mempermudah pemakai jasa perpustakaan, menemukan bahan pustaka atau informasi secara singkat fungsi serta manfaat perpustakaan, efektif pengembangan perpustakaan pada UPTD SD Negeri 73 Parepare belum terlalu efektif hal ini disebabkan buku dan bahan ajar di sekolah masih kurang, hal ini yang akan mempengaruhi mutu pendidikan yang ada di sekolah.

b) Perawatan Sekolah

Secara efektif pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah berjalan dengan baik, dimana memperbaiki bangunan yang mengalami kerusakan secara bertahap.

c) Pembelian Bahan Habis Pakai

Pembelian bahan habis pakai di sekolah sudah dipergunakan dengan baik, pembelian habis pakai seperti spidol, buku induk, kapur, dan masih banyak lagi yang penggunaan dana BOS pada pembelian Bahan habis pakai sudah efektif dipergunakan.

d) Layanan daya dan Jasa

Secara efektif penggunaan dana BOS untuk layanan daya dan jasa belum terlalu efektif, dimana pada pembiayaan listrik dan air sering mengalami

keterlambatan hal ini disebabkan dari dana BOS yang mengalami keterlambatan pencairan.

4. Efisiensi

Prinsip efisiensi merupakan dana yang digunakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan, dan ketepatan sasaran penggunaan dana BOS. Pengelolaan keuangan sekolah digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu pendidikan secara efisiensi guna meningkatkan kualitas pendidikan seperti pengadaan buku-buku siswa guna menambah wawasan dan ilmu yang dimiliki siswa.

a. Pengembangan Perpustakaan

Pengembangan perpustakaan adalah upaya untuk mengembangkan perpustakaan sebagai aktivitas yang memiliki peran dan tanggung jawab penting sebagai sumber ilmu pengetahuan di UPTD SD Negeri 73 Parepare, namun masih dalam tahap pengembangan, karena perpustakaan yang ada di sekolah tersebut belum memiliki banyak fasilitas atau bahan pustaka sekolah, terutama buku paket sekolah masih kurang, sehingga pengembangan perpustakaan yang ada di sekolah masih perlu ditingkatkan agar menjadi perpustakaan yang efektif dan efisien.

b. Perawatan sekolah

Perawatan sekolah atau perawatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah harus diperhatikan karena sarana dan prasarana dapat menunjang pendidikan suatu sekolah.

c. Pembelian Bahan Habis Pakai

Pembelian bahan habis pakai merupakan salah satu alokasi pembiayaan dana BOS yang ada di sekolah, secara efisien pembelian bahan habis

pakai sudah di jalankan di sekolah dimana sekolah menyediakan bahan-bahan habis pakai untuk dipergunakan oleh tenaga pendidik dan siswa.

d. Layanan Daya dan Jasa

Layanan daya dan jasa yang ada di sekolah dipergunakan untuk pembiayaan listrik, air serta vocer internet sekolah, akan tetapi layanan daya dan jasa yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare belum efektif dan efisien, hal ini terkait dengan adanya keterlambatan pencairan dana Bos.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana BOS

Dalam pengelolaan dana BOS kepala sekolah beserta tim BOS sekolah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima. Pengelolaan dana BOS secara terbuka melibatkan pengelola sekolah di mana kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab dana BOS yaitu memutakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik, bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data sekolah yang masuk dalam Dapodik, menyusun RKAS yang mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS, melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan.

Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan bentuk pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare melalui tugas dan tanggung jawab pengelolaan dana BOS yaitu: kepala sekolah sebagai penanggung jawab dari dana BOS terutama dalam penyusunan RKAS sekolah seperti, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang meliputi:

1. Sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana yang akan dikelola.
2. Penyusunan dan pencairan anggaran.

3. Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya.
4. Pembukuan semua penerima dan pengeluaran serta penggunaan dana BOS.

Kemudian tugas dan tanggung jawab dari bendahara, bendahara dituntut memiliki kepribadian yang jujur dimana tugas bendahara sebagai yang menaggarkan dana BOS yang telah disepakati oleh kepala sekolah.

Bukan hanya itu tugas dan tanggung jawab bendahara melainkan bendahara juga membantu kepala sekolah dalam penyusunan RKAS, mengelola dan mengadministrasikan keuangan sekolah, menyusun RKAS, gaji guru, biaya operasional dan biaya perawatan sekolah. Kemudian tugas dan tanggung jawab guru dan komite sekolah, guru disini sebagai pengguna dana BOS sekolah dan guru melaporkan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana BOS terutama pada saat proses pembelajaran, kemudian komite sekolah tentunya komite ini bertugas sebagai pengawas jalanya dana BOS sekolah.

c. Mekanisme Pengelolaan dana BOS

Mekanisme pengelolaan dana BOS terbagi menjadi tiga tahap pencairan dana BOS yang pertamama tahap I sebesar 30%, tahap ke II sebesar 40% dan tahap III 30%, proses pencairan dana BOS sanagat diperlukan oleh sekolah, akan tetapi pada proses pencairan sering mengalami keterlambatan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan mengenai bentuk pengelolaan dana BOS UPTD SD Negeri 73 Parepare tentang mekanisme pencairan dana BOS dan kendala-kendala kurangnya sarana dan prasarana yaitu: pengelolaan dana BOS memang pencairannya melalui 3 tahap akan tetapi pada proses pencairan dana BOS mengalami keterlambatan

sehingga sarana dan prasarana yang ada di sekolah mengalami kekurangan tentunya ini akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan sekolah.

d. Mutu Pendidikan

Dari hasil yang telah didapatkan dari Pengelolaan dana BOS terhadap Mutu pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare yaitu, dalam pengelolaan dana BOS terhadap mutu pendidikan sarana dan prasaran di sekolah masih kurang memadai, dimana kelengkapan buku paket siswa masih kurang, media pembelajaran pun belum memadai, hal ini terkait dengan pengelolaan dana BOS yang mengalami keterlambatan sehingga kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan.

2. Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare

1. Ketetapan Sasaran

Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah tepat sasaran, Berdasarkan data yang di peroleh dari lapangan Efektivitas pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare, Dengan adanya dana BOS sekolah tentu sangat membantu sekolah melaksanakan kegiatan- kegiatan sekolah, ketetapan sasaran program dana BOS ini membantu pembebasan biaya anggaran seperti kegiatan organisasi atau kegiatan perlombaan.

- a. Ketetapan sasaran dana BOS secara transparan di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah dilakukan secara transparan, dimana ketetapan sasarnya meringankan beban siswa yang kurang mampu, menginformasikan, pembebasan biaya anggaran seperti kegiatan- kegiatan organisasi maupun kegiatan olimviade .

- b. Ketetapan sasaran secara akuntabilitas, belum teralalu baik, karena pengelolaan dana BOS sering mengalami keterlambatan pencairan
- c. Ketetapan sasaran secara efektif dan efisien belum tepat keterlambatan pencairan dana BOS yang mengalami keterlambatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, hal ini dapat mempengaruhi operasional sekolah terutama sarana dan prasarana yang ada di sekolah mengalami kekurangan terutama pada pengembangan perpustakaan dimana buku paket untuk siswa tidak mencukupi.

2. Sosialisasi Program

sosialisasi program Dana BOS, yang dilakukan di UPTD SD Negeri 73 Parepare dilakuakn dengan cara online, diadakan rapat tentang bagaimana pengelolaan Dana BOS yang ada disekolah, dan mensosialisasikan dengan cara melihat anggaran dana BOS pada papan penggunaan dana BOS yang tersedia.

3. Pemantauan Program

Pemantauan program dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare dengan melihat data rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang telah disusun sebelumnya dengan melihat hasil perbandingan penggunaan anggaran sekolah. Dari hasil pemantauan ini program yang dilakukan UPTD SD Negeri 73 Parepare yang digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Dimana pengawasan yang dilakukan sudah cukup efektif .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Pengelolaan dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare belum memadai terutama pada sarana dan prasarana yang ada di sekolah masih kurang yang diakibatkan bahwa keterlambatan pencairan dana BOS yang sering terlambat dimana dana BOS cair pada tiga tahap, yaitu tahap I, tahap II, dan tahap III, terkadang dana BOS pada tahap I baru cair di tahap II sehingga ini yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana BOS. Kemudian bentuk pengelolaan dana BOS secara transparan sudah dilakukan secara terbuka, akuntabilitas pengelolaan dana BOS sudah dilakukan dengan baik yang dimana adanya pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS terhadap orang tua murid dan komite sekolah secara efektivitas dan efisien pengelolaan dana BOS yang memprioritaskan pembelian sarana dan prasarana yang mendesak agar mampu meningkatkan mutu pendidikan secara efektif dan efisien.
2. Efektivitas Pengelolaan dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan Dengan adanya dana BOS disekolah maka dapat membantu para peserta didik maupun tenaga pendidik, Ketetapan sasaran dana BOS secara Transparan sudah dilakukan

secara transparan dimana sasaran dana BOS ini diperuntukan kepada siswa yang kurang mampu, pembebasan biaya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian ketetapan sasaran secara akuntabilitas belum berjalan dengan baik yang disebabkan pada pelaporan dana BOS yang mengalami keterlambatan pencairan dana BOS, secara efektif dan efisien belum baik yang disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana BOS yang tidak sesuai dengan tahap-tahap pencairan dana BOS. Kemudian Sosialisasi Program secara transparan dan akuntabilitas, secara efektif dan efisien tentunya dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program yang ada di sekolah, sudah dilakukan dengan cara melalui media online seperti grup whatsapp antara guru-guru dan orang tua siswa/wali murid atau dengan adanya bantuan dari komite sekolah yang dapat membantu mensosialisasikan kepada wali murid tentang apa-apa saja program yang ada di sekolah. kemudian dari segi Pemantauan Program secara transparan, akuntabilitas, efektivitas dan efisien harus dilakukan secara terbuka dimana dilihat dari kinerja pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah berjalan baik. Mutu pendidikan yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare belum berjalan dengan baik dimana sarana dan prasarana masih kurang terutama pada buku paket dan media pembelajaran yang belum lengkap.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare, penulis ingin menyampaikan beberapa hal yang bisa dijadikan bahan masukan untuk tercapainya manajemen kelas yang efektif dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amiruddin, dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ayu Komang Ratna Dewi, I Made Yudana, Anak Agung Gede. “Efektivitas Program Bantuan Operasional (BOS) Pada SMP Negeri 4 Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesa* Vol. 6, No (n.d.): h.9.
- Azwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Bohari. *Dasar - Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Budi Ilham Maliki. “Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia.” *Jurnal Tarbawi Stai Al Fitrah* Vol. 4 Nom (2018): 172.
- Dani Rahman Hakim. “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah Kejuruan.” *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi* Vol. 17, no. 1 (2020): 12.
- E. Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Fika Ayu Lestari, Muh. Rahim, Lilis Suriani. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Program Bantuan Operasional Sekolah.” *Jurnal Basicedu* Vol. 5, No (2021): 2.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak, 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd. K. Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare: Wawancara di Parepare, n.d.
- . *Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare*. di Parepare, 2022.
- Hj. Hastuti, S.Pd. *Bendahara*. di UPTD SD Negeri 73 Parepare, n.d.

- . *Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare*. Wawancara di Parepare, n.d.
- Kartika Febri Yuliana. *Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Gratis*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Lukman Pardede, Hotman Simanjuntak. “Tanggung Jawab Hukum Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.” *Jurnal USM Review* Vol. 4 No (2021): 896.
- M.R. Steers. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Mia Silmi Nurdiani, Nugraha. “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah.” *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN* Vol. 6, No (2018): 50.
- Moh. Yamin. “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Ketetapan Penyaluran BOS Tingkat SDN di Kabupaten Banjar.” *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin* Vol. 12. N (2018): 47.
- Muhammad Basri. “Budaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan.” *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* Vol. 1, No (2011): 161.
- Mujamil Qamar. *Manajemen Pendidikan Islam*. Surabaya: PT Erlangga, 2007.
- Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyono. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: Ar - Ruzz, 2010.
- Nettinawati. *Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare*. Wawancara di Parepare, n.d.
- . *S.Pd. Parepare*, n.d.
- Rita Mariyana, Ali Nugraha, Yeni Rachmawati. *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Rizcah Amelia. *Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Anaka Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin, n.d.
- Salinan Lampiran Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Bantuan Operasional Sekolah Reguler*, n.d.
- Siswanto. *Pengantar Manajemen*. PT Bumi Ak. Jakarta, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2016.

- Sumarni. "Efektivitas Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan." *Jurnal Edukasi* Vol. 12. N (2014): h. 83-98.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilackra, 2018.
- Syamsir. *Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 3 Panca Rijang Kec. Kulo*. Sidrap: UIN Alauddin, 2014.
- Winardi. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Yean Chris Tien. "Manajemen Peningkatan Lulusan." *jurnal Manajer Pendidikan* Vol. 9, No (2015): 9.
- Yenni Anggraini. *Analisis Kompetensi Pedagogik Guru PAI Di SMP Negeri 1 Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Uin Raden Fatah Palembang, 2020.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBIYAH

Alamat : Jl. Amal 24, Marwatu Parepare 91132 telp. (0421) 21307, fax 24404
PO Box 909 Parepare 91132, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4392/In.39/FTAR.01/PF/TA/P/1442/2022

03 Desember 2022

Lampiran : 1 Bundel Proposal Penelitian

H a l : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Walikota Parepare

C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di,-

Kota Parepare

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Rasmi Sirajuddin
Tempat/Tgl. Lahir : Maroangin, 27 Juni 1999
NIM : 18.1900.050
Fakultas / Program Studi : Tarbiyah / Manajemen Pendidikan Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Dusun Botto Maiwang, Desa Puncak Harapan, Kec. Marwa,
Kab. Enrekang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan Di UPTD SD Negeri 73 Parepare". Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai bulan Januari Tahun 2023.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

- 1 Rektor IAIN Parepare
- 2 Dekan Fakultas Tarbiyah



SRN IP000863

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 863/IP/DPM-PTSP/12/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
 NAMA : **RASMI SIRAJUDDIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

ALAMAT : **DESA PUNCAK HARAPAN, KEC. MAIWA, KAB. ENREKANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI UPTD SD NEGERI 73 PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE (UPTD SD NEGERI 73 PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **07 Desember 2022 s.d 07 Januari 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **09 Desember 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)







**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SD NEGERI 73 PAREPARE
KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

Alamat: Jl. Laupe, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, 91132
Telp. 0421-26405 e-mail: h.a.pajung86@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 421.2649/UPTD-SDN.73/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ANDI PAJUNG, S.Pd., M.Pd.
Nip : 19660608 198811 1 006
Jabatan : Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : RASMI SIRAJUDDIN
NIM : 18. 1900.050
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah
Semester : IX (Sembilan)
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Telah selesai melaksanakan Penelitian di UPTD SD Negeri 73 Parepare untuk melakukan Penelitian skripsi dengan judul "*Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare*".

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Parepare, 7 Januari 2023
Kepala UPTD SD Negeri 73 Parepare

H. ANDI PAJUNG, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19660608 198811 1 006

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd.

Jabatan : Kepala Sekolah

Menyatakan bahwa:

Nama : Rasmi Sirajuddin

Nim : 18.1900.050

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan UPTD SD Negeri 73 Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Desember 2022 di UPTD SD Negeri 73 Parepare

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Desember 2022

Informan



H. Andi Pajung, S.Pd, M.Pd.

PAREPARE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Hastuti, S.Pd.
Jabatan : Bendahara

Menyatakan bahwa:

Nama : Rasmi Sirajuddin
Nim : 18.1900.050

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan UPTD SD Negeri 73 Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Desember 2022 di UPTD SD Negeri 73 Parepare

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Desember 2022

Informan



Hj. Hastuti S.Pd.

PAREPARE

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Nettinawati S.Pd.
Jabatan : Guru

Menyatakan bahwa:

Nama : Rasmi Sirajuddin
Nim : 18.1900.050
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan UPTD SD Negeri 73 Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Desember 2022 di UPTD SD Negeri 73 Parepare

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Desember 2022

Informan



Nettinawati S.Pd.

PAREPARE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi. S. Pd.
Jabatan : Komite

Menyatakan bahwa:

Nama : Rasmi Sirajuddin

Nim : 18.1900.050

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan UPTD SD Negeri 73 Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 20 Desember 2022 di UPTD SD Negeri 73 Parepare

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Desember 2022

Informan



Rudi, S.Pd.

PAREPARE

1. MATRIKS WAWANCARA PENELITIAN

No.	Fokus Penelitian	Dimensi	Indikator	No. Item Instrumen	Jumlah Item Instrumen
1.	Efektivitas pengelolaan dana BOS	1. Efektifitas pengelolaan	1. Ketetapan sasaran 2. Sosialisasi Program 3. Tujuan Program 4. Pemantauan Program	1,2,3,4,5,6,7	7
		2. Pengelolaan keuangan sekolah	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Efektivitas 4. Efisiensi	8,9,10,11,12,13	6
		3. Pengelolaan dana BOS	1. Mekanisme Pengelolaan dana BOS 2. Tujuan dana BOS 3. Komponen Pembiayaan dana BOS	14,15,16,17,18	5
2.	Mutu Pendidikan	1. Peningkatan mutu pendidikan	1. Sarana dan prasarana	1,2,3,4	4

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : **Rasmi Sirajuddin**
Nim : **18.1900.050**
Fakultas : **Tarbiyah**
Prodi : **Manajemen Pendidikan Islam**
Judul : **Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasiobal Sekolah (BOS) Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare.**

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Sekolah

Identitas Responden

Nama :
 Jabatan :
 Waktu :

A. Efektivitas Pengelolaan dana BOS

Efektivitas Pengelolaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah tepat sasaran? 2. Apakah dalam pengelolaan ketetapan sasaran dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah berjalan dengan efektif dan efisien? 3. Dalam pengelolaan dana BOS apakah ketetapan sasaran sudah dilaksanakan secara transparansi dana akuntabilitas? 4. Bagaimana cara Bapak mengelola dana BOS agar tepat sasaran? 5. Bagaimana cara Bapak mensosialisasikan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare? 6. Apakah sosialisasi program pengelolaan dana BOS sudah dilaksanakan secara Transparan, akuntabilitas, efektif, dan Efisien? 7. Bagaimana cara Bapak sebagai Kepala Sekolah memantau Prgram dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?
Pengelolaan Keuangan Sekolah

8. Bagaimana cara Bapak menyediakan informasi terkait pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?
9. Apakah pihak Kepala sekolah memberikan akses kepada pihak- pihak terkait pengelolaan dana BOS?
10. Mengapa Pengelolaan keuangan sekolah di UPTD SD Negeri 73 Parepare harus dikelola secara transparansi?
11. Bagaimana cara di UPTD SD Negeri 73 Parepare membuat laporan penggunaan dana BOS?
12. Apakah setiap pengeluaran dana BOS harus disertai dengan adanya bukti?
13. Bagaimana bentuk laporan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare?

Pengelolaan dana BOS

14. Bagaimana bentuk Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?
15. Apa tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam Pengelolaan dana BOS?
16. Bagaimana Mekanisme pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 parepare?
17. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah transparansi, akuntabel, efektif, dan Efisien?
18. . Kelengkapan Pendukung apa saja yang harus tersedia dalam laporan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?

B. Mutu Pendidikan

Sarana dan Prasarana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Sarana dan Prasarana di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah efektif dalam menunjang mutu pendidikan ? 2. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah meningkatkan mutu pendidikan terutama pada pengelolaan sarana dan prasarana? 3. Apa yang menjadi Penghambat sehingga sarana dan prasarana yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare mengalami kekurangan? 4. Apakah sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar terhadap mutu pendidikan?

Wawancara dengan Bendahara

Identitas Responden

Nama :

Jabatan :

Waktu :

Efektivitas Pengelolaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah tepat sasaran? 2. Apakah dalam pengelolaan ketetapan sasaran dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah berjalan dengan efektif dan efisien?

<p>3. Dalam pengelolaan dana BOS apakah ketetapan sasaran sudah dilaksanakan secara transparansi dana akuntabilitas</p> <p>4. Bagaimana cara Ibu mensosialisasikan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?</p> <p>5. Apakah sosialisasi program pengelolaan dana BOS sudah dilaksanakan secara Transparan, akuntabilitas, efektif, dan Efisien?</p> <p>6. Bagaimana cara Ibu sebagai Kepala Sekolah memantau Program dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?</p>
<p>Pengelolaan Keuangan Sekolah</p>
<p>7. Bagaimana cara Bapak menyediakan informasi terkaitan pengelolan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?</p> <p>8. Apakah pihak Kepala sekolah memberikan akses kepada pihak- pihak terkait pengelolaan dana BOS?</p> <p>9. Mengapa Pengelolaan keuangan sekolah di UPTD SD Negeri 73 Parepare harus dikelola secara transparansi?</p> <p>10. Bagaimana cara di UPTD SD Negeri 73 Parepare membuat laporan penggunaan dana BOS?</p> <p>11. Apakah setiap pengeluaran dana BOS harus disertai dengan adanya bukti?</p> <p>12. Bagaimana bentuk laporan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare?</p>
<p>Pengelolaan dana BOS</p>

15. Bagaimana bentuk Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?
16. Apa tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam Pengelolaan dana BOS?
17. Bagaimana Mekanisme pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 parepare?
18. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah transparansi, akuntabel, efektif, dan Efisien?
20. Kelengkapan Pendukung apa saja yang harus tersedia dalam laporan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?

Wawancara dengan Guru

Identitas Responden

Nama :
 Jabatan :
 Waktu :

Efektivitas Pengelolaan dana BOS

Efektivitas Pengelolaan	
1.	Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah tepat sasaran?

2. Apakah dalam pengelolaan ketetapan sasaran dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah berjalan dengan efektif dan efisien?
3. Dalam pengelolaan dana BOS apakah ketetapan sasaran sudah dilaksanakan secara transparansi dana akuntabilitas?
4. Bagaimana cara Bapak mengelola dana BOS agar tepat sasaran?
5. Bagaimana cara Bapak mensosialisasikan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?
6. Apakah sosialisasi program pengelolaan dana BOS sudah dilaksanakan secara Transparan, akuntabilitas, efektif, dan Efisien?
7. Bagaimana cara Bapak sebagai Kepala Sekolah memantau Prgram dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?

Pengelolaan Keuangan Sekolah

8. Bagaimana cara ibu menyediakan informasi terkait pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?
9. Apakah pihak Kepala sekolah memberikan akses kepada pihak- pihak terkait pengelolaan dana BOS?
10. Mengapa Pengelolaan keuangan sekolah di UPTD SD Negeri 73 Parepare harus dikelola secara transparansi?
11. Bagaimana cara di UPTD SD Negeri 73 Parepare membuat laporan penggunaan dana BOS?
12. Apakah setiap pengeluaran dana BOS harus disertai dengan adanya bukti?
13. Bagaimana bentuk laporan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare?

Pengelolaan dana BOS

15. Bagaimana bentuk Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?
16. Apa tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah dalam Pengelolaan dana BOS?
17. Bagaimana Mekanisme pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 parepare?
18. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah transparansi, akuntabel, efektif, dan Efisien?
20. Kelengkapan Pendukung apa saja yang harus tersedia dalam laporan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare?

--

Mutu Pendidikan

Sarana dan Prasarana
<ol style="list-style-type: none">1. Apakah Sarana dan Prasarana di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah efektif dalam menunjang mutu pendidikan ?2. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah meningkatkan mutu pendidikan terutama pada pengelolaan sarana dan prasarana?3. Apa yang menjadi Penghambat sehingga sarana dan prasarana yang ada di UPTD SD Negeri 73 Parepare mengalami kekurangan?4. Apakah sarana dan prasarana memiliki pengaruh besar terhadap mutu pendidikan?

Wawancara dengan Komite Sekolah

Identitas Responden

Nama :

Jabatan :

Waktu :

Efektivitas Pengelolaan dana BOS

Efektivitas Pengelolaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah tepat sasaran? 2. Apakah dalam pengelolaan ketetapan sasaran dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare sudah berjalan dengan efektif dan efisien? 3. Dalam pengelolaan dana BOS apakah ketetapan sasaran sudah dilaksanakan secara transparansi dana akuntabilitas? 4. Bagaimana cara Bapak mensosialisasikan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare? 5. Apakah sosialisasi program pengelolaan dana BOS sudah dilaksanakan secara Transparan, akuntabilitas, efektif, dan Efisien?
Pengelolaan dana BOS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk Pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 Parepare? 2. . Apa tugas dan Tanggung Jawab Komite Sekolah dalam Pengelolaan dana BOS? 3. . Bagaimana Mekanisme pengelolaan dana BOS di UPTD SD Negeri 73 parepare?



Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel Data Sarana dan Prasarana di UPTD SD Negeri 73 Parepare

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Ruang Kepala Sekolah	1
2	Ruang Guru	1
3	Ruang Kelas	6

4	Kantor	1
5	Perpustakaan	1
6	UKS	0
7	Mushola	0
8	WC umum	4
9	Lapangan Tenis Meja	0
10	Lapangan Volly	1
11	Aula	1
12	Gedung	1
13	Lemari kelas	12
14	Papan tulis	7
15	Printer	2
16	Computer	1
17	Laptop	2
18	Tempat sampah	10
19	Sofa	1
20	Penghapus papan tulis	7

(Sumber Data: UPTD SD Negeri 73Parepare)



Pintu masuk di UPTD SD Negeri 73 Parepare



Wawancara Bersama Kepala UPTD SD Negeri 77 Parepare



Wawancara dengan Bendahara UPTD SD Negeri 73 Parepare



Wawancara bersama Guru UPTD SD Negeri 73 Parepare



Wawancara bersama Komite Sekolah UPTD SD Negeri 73 Parepare



Ruangan Perpustakaan



Ruangan Guru



REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE APRIL - AGUSTUS TAHUN 2020

NAMA SEKOLAH : LPTD SD NEGERI 73 PAREPARE
DESA / KECAMATAN : BUKIT HARAPAN / SOREANG
KAB/KOTA : PAREPARE
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN PEMBELANJAAN														JUMLAH PENGELUARAN														
		pendek	honor peserta didik baru	retribusi kebersihan	air	elektrik	voucher internet	laptop	koran/majalah	honor non pns	bahan bangunan	media misam tamu	bisa presiden/wali	ATR	honor pns		panitia pelaksanaan	bahan pembantu	materai	penunjang operasional	alat-alat									
1	peserta didik baru	125.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.625.000									
2	Pengembangan prestasi	-	-	-	-	-	-	-	-	630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.000									
3	kegiatan pembelajaran elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.120.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.120.000									
4	kegiatan persiapan/realisasi pembelajaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
5	administrasi kegiatan sekolah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
6	pengembangan sumber daya dan tenaga kependidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444.800	-	-	-	-	-	-	444.800									
7	kegiatan daya dan jasa	-	-	-	120.000	243.360	240.940	10.605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.209.300									
8	pembelian sarana dan prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
9	penyediaan alat multi media pembelajaran	-	-	-	-	-	-	-	3.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.950.000									
10	pebayaran honor	-	-	-	-	-	-	-	-	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.200.000									
JUMLAH KESELURUHAN																														
Dana yang Diterima																													66.400.000	
Dana Sisa Tahap Lalu																													1.22.940	
Total Dana yang Diterima Sisa																														67.622.940

Parepare, 31 Agustus 2020

Mengertahi,
Kepala LPTD SD NEGERI 73 Parepare

Bendahara

HANDI PAUNG S.Pd M.Pd
NIP.196313111982061065

HI. HASTUTI S.Pd
NIP.1980040120110121007

Scanned by TapScanner

Rekapilitasi Realisasi Penggunaan dana BOS



BIOGRAFI PENULIS



Rasmi Sirajuddin, lahir di Maroangin pada tanggal 27 April 1999, anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Sirajuddin dan Ibu Mahniati. Penulis bertempat tinggal di Dusun Botto Maiwang, Desa Puncak Harapan, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Penulis memulai pendidikannya di SDN 135 Botto Maiwang dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MTs Guppi Kaluppang dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di MTs penulis kemudian melanjutkan pendidikan di UPT SMA Negeri 4 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Tarbiyah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada semester akhir yakni semester 6, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) tahun 2020 di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Baraka, Desa Jangurara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di UPT SMP Negeri 2 Suppa. Hingga saat ini, penulis telah menyusun skripsi dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Terhadap Mutu Pendidikan di UPTD SD Negeri 73 Parepare”